

EPISTEMOLOGI ISLAM
Upaya Menemukan Ortodoksi Islam

(Kumpulan Ceramah-Ceramah Keagamaan di Tanah Jawara)

Disusun oleh:
Abdullah Jarir

THE KALAM KAUTSAR INSTITUTE
2025

KONSTRUKSI MASYARAKAT ISLAM

Secara konseptual, setiap orang akan mudah memahami apa dan bagaimana konstruksi masyarakat Islam. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang dibangun atas sendi-sendi Islam. Sendi-sendi Islam yang dimaksud adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Dengan kata lain Suatu masyarakat (ummat) dikategorikan sebagai masyarakat Islam ketika Al-Quran dan Al-Sunnah telah menjadi sumber, pedoman, imam, *commen platform*, ruh, pandangan hidup dalam prikehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah/5:48 yang artinya : ...maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan.

Dalam tataran praktis-ideal, masyarakat Islam mesti berada di tengah suatu negara-bangsa(*nation-state*) yang Islami. Adalah sulit, kalau tidak mau disebut mustahil, mewujudkan dan membumikan suatu masyarakat Islam sementara pemerintahan dan negaranya sekuler, setengah sekuler, atau abu-abu yang *under estimate* terhadap nilai-nilai uneveralitas Islam. Problemnya adalah mungkinkah suatu masyarakat Islam bisa tegak di tengah-tengah kehidupan sekuler, pemerintahan sekuler, hukum sekuler, dan sistem ekonomi ribawi (*interested debt*) yang kapitalistik, monopolistik yang cenderung melahirkan komunitas konglomerat hitam seperti yang terjadi di negeri kita yang tercinta ini. Mungkinkah ?

Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita sebagai umat Islam cukup punya tenaga untuk membumikan semua idealisme keislaman kita di tengah-tengah keterbelakangan kita sebagai umat Islam. Masyarakat Islam seyogianya menjadi cita-cita tertinggi setiap insan yang mengaku muslim. Jika seorang muslim tidak memiliki suatu pemikiran sedikitpun -walaupun hanya sekedar cita-cita- untuk mewujudkan suatu model masyarakat Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah, maka masih bermaknakah semua amal ibadah kita di sisi Allah "azza wa jalla?

Memang benar kalau kita coba lihat litelatur yang ada, tak dapat kita temukan satu ayat atau satu hadts pun baik secara eksplisit atau pun implisit yang menyuruh umat Islam untuk mendirikan negara Islam (*daulat Islamiyat*). Namun secara *de facto*, keberadaan suatu negara dan pemerintahan yang di dalamnya nilai-nilai Islam yang digali dari Al-Quran dan Al-sunnah jelas pernah hidup secara *real fact* di tengah-tengah masyarakat . Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat Madinah yang ideologynya tiada lain adalah Muhammad SAW sendiri yang *diback up* oleh para shahabatnya. Kedudukan Muhammad SAW saat itu adalah sebagai seorang kepala negara dan pemerintahan sekaligus sebagai seorang nabi. Para ahli sejarah mana yang membantah kebenaran sejarah tentang keberadaan Muhammad sebagai pemimpin negara dan agama sekaligus pada abad ke 7 masehi tersebut.

Konstruksi Masyarakat Islam

Masyarakat Islam itu dibangun, dilaksanakan, dan diformat sebagai suatu masyarakat yang konstruksinya dari sistem hukum dan undang-undang Islam, sistem politik dan ketatanegaraan Islam, dan sistem ekonomi dan perdagangan Islam, yang kesemuanya itu berorientasi pada *tauhidullah*, yaitu suatu masyarakat yang berorintasi dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Sesuai dengan firmanNya dalam surat Al-Dzariyat/51:56 yang artinya : dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku.

Kebalikan dari masyarakat Islam adalah masyarakat sekuler, yaitu masyarakat yang orientasi hidupnya semata-mata dunia. Pandangan hidupnya materialisme. Segala sesuatu diukur melalui kaca mata untung rugi. Masyarakat seperti ini adalah masyarakat semu. Semu dalam kemajuan, semu dalam kebahagiaan, dan semu dalam hidup dan kehidupannya, dikarenakan mereka lebih percaya dengan hukum yang dibuat oleh manusia. tentang hal ini Allah befirman dalam surat Al-Maidah/5:50 berikut ini yang artinya : apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki.

Karakteristik Masyarakat Islam

Karakteristik pertama adalah terjaminnya dan terlaksananya syariat Islam dalam segala aspek dan sendi kehidupan bermasyarakat. Pengamalan syariat ini benar-benar terlaksana dengan dukungan perangkat hukum (yuridis formal), seperti telah diberlakukannya Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang eradikan Agama di Indonesia. Jadi Dalam tataran ideal, secara *de jure* dan *de facto* syariat Islam benar-benar telah menajdi pandangan hidup (*westanchaugh*) bagi masyarakat yang ada di dalamnya. (Al-Quran surat Al-Maidah/5:52)

Karakteristik kedua adalah tegaknya keadilan. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam semua sendi kehidupan masyarakat. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan sosial, dan keadilan dalam lapangan kehidupan yang lainnya. Sebagaimana disitir oleh Allah dalam surat Al-Nisa /4:58 dan Al-Nahl/16:90.

Karakteristik ketiga adalah prinsip kebebasan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan berfikir, beragama, mengemukakan pendapat, dan kebebasan dari rasa lapar dan takut. Tentang kebebasan menyatakan pendapat dapat dilihat dalam firman Allah srat Al-Baqarah/2:164, Al-Thariq/86:5-7, Qaf/50:6-7, Shad/38:29. Al-Nahl/16:68-69, Al-Jatsiyah/45:12-13. Al-Zumar/39:9, dan Al-Nur/24:44. dari keempat kebebasan tersebut, Al-Quran sempat menyitir tentang terjaminnya kebebasan seseorang untuk menganut dan menjalankan agama dan kepercayaannya itu sesuai keyakinannya masing-masing sebagaimana termuat dalam firman Allah surat Al-Baqarah/2:226. Makna yang sama juga dapat ditemukan dalam surat Al-Kafirun/109:6, Yunus/10:99, dan Al-Kahfi/18:29.

Karakteristik keempat adalah prinsip persamaan (*egalitiy*). Islam memandang seluruh manusia sama di depan Allah SWT. Hanya iman dan taqwa yang menjadi tolok ukur kemulyaan seseorang. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-hujurat/61:13. Bahkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad Nabi bersabda yang artinya : orang arab tidak lebih mulia dari orang non arab kecuali dengan taqwanya.

Karakteristik kelima adalah prinsip persaudaraan (*ukhuwwah Islamiyah*). Prinsip ini mengajarkan umat Islam untuk memiliki rasa empati terhadap sesama manusia. Prinsip ini juga mendorong terciptanya kesatuan umat yang hal ini akan menjadi modal dasar terciptanya energi untuk tetap terpeliharanya nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, Masyarakat Islam adalah resultante dari sinergi besar konstruksi dan karakteristik yang pada ending pointnya adalah terciptanya sebuah masyarakat Islam yang kokoh dan bermartabat. Tentu paparan ini adalah baru sebatas wacana, harapan, dan cita-cita (*das sollen*) semata-mata, tapi semoga kita mampu suatu ketika untuk mewujudkannya menjadi sesuatu yang nyata (*das sein*). Semoga . *Wallahu 'a lam* .

PILKADA DAN PROSES TRASFORMASI DEMOKRASI

Pemilihan Kepala Daerah Langsung (PILKADA) yang tengah berlangsung hampir di seluruh penjuru tanah air merupakan suatu langkah maju dalam berdemokrasi. Proses ini layak mendapat dukungan semua pihak terutama warga masyarakat sebagai yang memiliki kedaulatan sesungguhnya (lihat UUD 1945). Apaun hasilnya, sebagai bangsa yang masih belajar berdemokrasi (*beginner in democracy*), harus diterima dengan penuh besar jiwa.

Satu hal yang selalu menjadi kekhawatiran kita semua ketika melewati suatu proses demokrasi yang melibatkan warga masyarakat, apalagi proses tersebut adalah sesuatu yang baru, adalah konflik horisontal antar warga masyarakat yang memiliki perbedaan kepentingan politik. Kekhawatiran ini jelas sangat beralasan mengingat bangsa ini sangat rentan dengan kekerasan dan anarkisme akibat proses pendidikan politik yang mandeg. Mandeg secara pemikiran dan nalar, juga mandeg secara psikologis. Sehingga setiap kali terjadi gesekan yang diakibatkan perbedaan kepentingan politik praktis, setiap kali itu juga terjadi konflik antar pendukung tokoh yang yang didukungnya.

Lelah sudah bangsa ini terus menerus didera konflik akibat tidak arifnya pemimpin menyikapi kekalahan. Lihat saja bagaimana pendukung Zainuddin MZ yang menghalau mobil Menteri Dalam Negeri. Mereka memaksa sang menteri untuk melantik kepengurusan Partai Bintang Reformasi di bawah pimpinan sang Kiyai itu. Belum lagi konflik gerakan pembaharuan PDI Perjuangan dengan kubu Megawati. Konflik di PKB pun semakin memanas dengan terpecahnya partai tersebut menjadi dua kubu. kubu Muhaiman Iskandar dan Kibu Alwi shihab. Semua konflik yang bernuansa politik itu semuanya melibatkan massa. Mengapa? pemimpin nya tidak arif.

Memang godaan kekuasaan begitu hebat. kekuasaan dapat mendatangkan jabatan dan jabatan bisa mendatangkan kekayaan. Itu sebabnya banyak di antara kita yang mengejar kekuasaan. Karena dalam kekuasaan itu, ada kekayaan. Entah apa yang akan terjadi jika kekuasaan tidak mendatangkan kekayaan. Sepertinya percaturan politik kita akan sepi pembeli. Dalam konteks ini, Nurcholis Majid pernah berujar bahwa sudah waktunya kita merasa terhormat menjadi oposisi. Menjadi oposisi berarti kita mulai mencoba membalikkan mainstream pemikiran dan opini kita selama ini yang merasa terhormat menjadi pejabat publik.

Itulah gambaran atau potret kelam demokrasi kita. Demokrasi yang tertatih-tatih dikarenakan proses transformasi yang kurang berjalan mulus. Suatu proses yang gamang penuh *trial dan error*. Pembelajaran dan pendidikan politik kita tidak matang dan terencana. Sumber daya manusia kita tidak mampu mentransformasi secara memadai konsep demokrasi untuk selanjutnya dimatangkan dan diaplikasikan dalam proses suksesi kepemimpinan nasional dan daerah.

Di samping itu, kendala lemahnya integritas moral turut pula mendorong kehancuran sistem demokrasi kita. lihat saja bagaimana lembaga terhormat yang menajadi rumah dan dapurnya proses pemilihan kepemimpinan nasional pada pemilu 2004 kemarin, amblas secara memalukan dikarenakan korupsi. ini adalah suatu tragedi kemanusiaan yang sangat ironi. Mengapa bisa terjadi demikian? lagi-lagi SDM kita yang rapuh. Rapuh dari semangat perjuangan dan idealisme. Idealisme berbangsa kita telah mati.

melihat realitas sosio-politik seperti ini, apa yang mesti kita kedepankan sebagai solusi dini dan preventif untuk kemajuan demokrasi kita? Banyak hal yang harus dikerjakan. Satu yang terpenting adalah ubah orientasi kekuasaan para pemimpin publik kita dari orientasi kepentingan politik sesaat menjadi orientasi kepentingan nasional yang lebih bernilai. Jika ini menjadi pijakan para pemimpin kita baik di daerah atau pun di pusat, niscaya proses transformasi demokrasi kita akan mulus. Jika tidak, maka malapetaka yang diakibatkan rendahnya kesadaran politik pemimpin ini akan melahirkan bencana demi bencana politik yang lebih menakutkan.

Penegakkan supremasi hukum, keadilan sosial, keadilan ekonomi, penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan budaya juga merupakan hal-hal yang harus menjadi pertimbangan kita semua ke depan. Bagaimana semua itu bisa menjadi pedoman dan perisai kita dalam melalui tahapan berdemokrasi yang sehat. Lihatlah bagaimana cara-cara pemimpin bangsa kita dahulu dalam berdemokrasi. Contohlah mereka. Contohlah Pak Syafruddin Prawiranegara yang rela menyerahkan kekuasaannya kepada Bung Karno dengan ikhlas dan tulus tanpa menyimpan dendam dan menyisakkan masalah untuk bangsa ini.

Apalagi jika kita merenungkan cost yang harus dikeluarkan untuk PILKADA ini. Uang rakyat ini seyogianya diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Tentu dzalim sekali, jika dana yang sangat besar ini dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak melahirkan kemajuan di kemudian hari. Demokrasi memang mahal. Barang impor ini selalu mendatangkan keruwetan nasional. Tetapi mengapa kita masih mau juga menggunakannya?

Semoga kita semua dapat melalui tahapan proses transformasi berdemokrasi ini dengan aman, selamat dan melahirkan sesuatu yang berarti bagi kemajuan bangsa ini.

KENAIKAN TUNJANGAN ANGGOTA DPR dan DALIH KEMANDIRIAN

Mukaddimah

Maaf untuk kali ini kami masyarakat dan bangsa Indonesia harus mengatakan beribu maaf dan sangat a priori dengan niat atau rencana pihak perlemen untuk meningkatkan tunjangan anggota DPR dengan dalih kemandirian. Kali ini kami sangat ekstrem. Menolak rencana tersebut karena waktunya sangat tidak tepat. Lihatlah antrian masyarakat kita untuk membeli minyak tanah dan premium. Lihatlah masyarakat kita yang sedang didera busung lapar di sini di Tangerang ini kami berteriak dengan sisa-sisa tenaga dan energi kami akibat gizi buruk. Apalagi jika dikaitkan dengan kondisi perekonomian bangsa ini yang dari hari ke hari tidak jua menampakkan ke arah perbaikan yang berarti. Lalu, mengapa parlemen yang mestinya punya pemikiran dan daya nalar yang cermat dan kreatif untuk perbaikan bangsa ini dengan mengedepankan kepentingan sosial masyarakat kita, ini malah punya niat yang engga-engga dengan alasan kemandirian, kok tunjangan yang dinaikkan. Apa hubungannya?

Oke lah kemandirian. Itu sesuatu yang sangat mulia. Kemandirian adalah nilai luhur dan modal dasar untuk menghasilkan sesuatu kinerja yang baik. Tapi, kemandirian apa yang akan dihasilkan jika memang kenaikan tunjangan itu benar-banar dilaksanakan? Janji apa lagi ini? Apakah anggota parlemen yang terhormat tidak bosan bermain dengan janji-janji pembangunan yang tak jarang menuai kecaman karena tak jelas hasilnya itu. Apakah selama ini instansi-instansi kenegaraan yang mandiri secara kelembagaan dengan eksekutif, seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, komisi-komisi pemberantasan korupsi, dan lain-lain lembaga Negara itu kurang mandiri, tapi mana hasilnya?

Jadi oleh sebab itu, penolakan kami masyarakat bawah dengan rencana kenaikan tunjangan anggota DPR dengan dalih kemandirian bukan semata-mata momentum yang tidak tepat, tapi lebih-lebih disebabkan oleh tidak ada jaminan bahwa dengan dinaikannya tunjangan itu kinerja anggota parlemen kita menjadi lebih baik ke depannya. Karena, seperti kejadian-kejadian yang lalu, parlemen kita hanya bermain dalam tataran retorika semata, dan sedikit yang menjadi kenyataan.

Kemandirian dalam Kesederhanaan

Sesungguhnya masyarakat kita dapat memahami beban kerja parlemen yang salah satu fungsinya adalah pengawasan. Pengawasan yang dimaksud adalah fungsi legislative yang bertujuan mengawasi laju pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan (eksekutif). Tugas ini mencakup semua kebijakan-kebijakan pemerintahan yang diemban oleh Presiden dan pembantu-pembantunya yang bersifat nasional. Tentu lingkup kerja yang sedemikian besar ini menuntut kesungguhan, dedikasi, dan anggaran yang tidak sedikit.

Dan seperti yang kita ketahui dari penuturan ketua DPR RI Agung Laksono bahwa sulit melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan sedangkan sumber dana operasional DPR yang nota benanya mengawasi pemerintahan tersebut bersumber dari pemerintah. Sehingga proses dan system penyelenggaraan seperti ini bisa mengganggu objektivitas dan kemandirian kerja anggota parlemen. Memang masuk akal argumentasi ini. Namun, bukan berarti dengan alasan kemandirian, lantas kemudian tunjangan DPR yang menjadi solusinya. Tapi hendaknya dipikirkan secara matang solusi yang terbaik tanpa mengganggu anggaran. Karena sekali lagi, solusi ini mempunyai dampak psikologis yang besar terhadap image

parlemen kita. Rakyat kita sudah terlalu bosan dengan janji-janji pejabat Negara yang jarang atau sedikit terwujud di lapangan.

Jalan keluar yang bisa dimanfaatkan oleh Parlemen di antaranya dengan melakukan prinsip pengetatan anggaran, artinya bagaimana pos-pos anggaran yang ada sekarang ini dipangkas penggunaannya yang kemudian disalurkan untuk menutupi kekurangan-kekurangan dana operasional parlemen. Langkah ini perlu dipikirkan dengan cermat, sebab di antara sekian program kerja DPR pasti ada beberapa program yang kurang relevan atau belum begitu penting fungsinya. Intinya harus ada penghematan anggaran, meskipun dengan cara ini tentu akan ada penjadwalan ulang agenda program kerja. Yang penting bagaimana kebutuhan operasional parlmn bisa tertutupi tanpa adanya kenaikan tunjangan dan tanpa mengganggu kemandirian dan objektivitas parlemen sebagai lembaga pengawas.

Oleh sebab itu, alangkah baiknya dengan segala keterbatasan dan kondisi anggaran yang ada hendaknya anggota parlemen kita dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami yakin dengan kesederhanaan tidak akan mengurangi kerja dan fungsi-fungsi parlemen. Kekuatan moral dan kesungguhanlah yang insya Allah akan menggerakkan kinerja yang maksimal di tengah-tengah keterbatasan anggaran. Pemikiran ini layak untuk diketengahkan melihat gejala-gejala yang tampak di tengah-tengah masyarakat yang sangat a priori dengan ide kenaikan tunjangan ini. Alih-alih kemandirian yang hendak diraih, malah parlemen kita yang nantinya menuai badai kecaman dari masyarakat.

Akan tetapi, jika situasi dan kondisinya memungkinkan dan parlemen kita sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dengan mendahulukan prestasi, yakinlah bahwa apa pun kehendak parlemen, asalkan itu untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, masyarakat dan rakyat ini akan dengan senang hati mengiyakannya.

Visi Parlemen ke Depan

Parlemen sebagai lembaga tinggi negara, sejatinya berfikir, bergerak, dan bertindak berdasarkan pada suara dan hati nurani masyarakat dan rakyatnya. Rakyat kita mendambakan memiliki parlemen yang faham akan kehendak masyarakat. Keadilan benar-benar ditegakkan. Supremasi hukum dijunjung tinggi. Prioritas Pendidikan benar-benar terwujud. Kualitas kesehatan meningkat dan seterusnya. Ini memang pekerjaan berat, tapi minimal rakyat dapat melihat itu semua dari niat baik. Jadi, ada niat baik dari pejabat negara yang dapat ditangkap oleh rakyat kita. Bukan sebaliknya mempertontonkan kemewahan dan permintaan fasilitas macam-macam.

Sebagai lembaga yang bermain di tingkat nasional, seyogianya parlemen berkuat dengan problem dan masalah-masalah kerakyatan dan keindonesiaan. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan membuka pintu investasi dari dalam negeri maupun luar negeri, supaya tersedianya lapangan kerja yang seluas-luasnya. Bagaimana perlindungan TKI di luar negeri supaya mereka bekerja dengan penuh keyakinan dan benar-benar hak-haknya dilaksanakan dengan baik. Bagaimana integrasi bangsa ini terjamin keberlangsungannya supaya ketenangan dan keamanan betul-betul terasa dan ternikmati oleh masyarakat. Bagaimana integritas territorial negara ini tetap terjaga supaya ketahanan dan keberadaan Indonesia sebagai bangsa dan negara tetap utuh. Dan bagaimana membangun integritas moral rakyat, birokrat, dan pejabat kita sehingga menjadi sesuatu kekuatan maha dahsyat yang akan menjaga negara ini dari kehancuran.

Semua agenda-agenda besar kerakyatan di atas, sekali lagi, semestinya menjadi prioritas kerja dan menjadi visi kebangsaan dan kenegaraan parlemen kita. Alangkah senang dan bahagianya hati kami rakyat Indonesia, jika dengan segala keterbatasan, sebagaimana rakyat Indonesia saat ini yang mayoritas berada dalam keterbatasan dan kekurangan, dapat

menyaksikan parlemen kita, yang nota benenya pemilih mereka melalui pemilu kemarin, sibuk memikirkan rakyatnya dengan giat bekerja dengan segala keterbatasannya sehingga menghasilkan sesuatu yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Prestasi kerja yang selama ini dinantikan, mohom maaf, belum terlihat. Yang selama ini terlihat adalah pertarungan kepentingan politik antar partai politik yang lebih sering mengemuka dibandingkan pertarungan yang benar-benar untuk dan atas nama kepentingan rakyat dalam artian yang sebenarnya, permohonan fasilitas dan tunjangan yang sering muncul demi prestise dibandingkan prestasi kerja, dan macam-macam tontonan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh parlemen.

Salah satu yang perlu digarisbawahi adalah visi parlemen kita yang belum mencerminkan sikap kenegarawanannya. Yang sering muncul adalah sikap dan ego kelompoknya. Aksi walk out misalnya lebih sering dipertontonkan ketika kepentingan politik kelompoknya terancam, namun ketika menyangkut kepentingan rakyat banyak, rasanya parlemen kita kurang berselera menaggapinya. Atau paling-paling mereka bersembunyi di balik isu kepentingan rakyat, padahal tujuan akhirnya kepentingan politik kelompoknya.

Khatimah

Inilah barangkali beberapa pokok pikiran yang bisa diketengahkan, tentu saja ini adalah hasil pemikiran yang belum tentu benarnya. Namun sebagai suatu kontribusi pemikiran , saya berharap semoga bisa dijadikan sebagai bahan renungan dan diskusi lebih lanjut. Saya berharap pikiran ini tidak bermaksud melakukan konfrontasi atau medan pertempuran antara rakyat dan parlemn, namun semua ini tak lebih sebagai bentuk tanggung jawab moral saya sebagai anggota masyarakat. *Wallahu 'alam*

DESAKRALISASI PEMIKIRAN ISLAM

Mukaddimah

Desakralisasi pemikiran Islam adalah suatu usaha sistematis yang dilakukan oleh orang Islam atau nonislam baik disengaja atau tidak untuk menghancurkan sendi-sendi akidah keislaman yang lurus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Akar sekularisasi sesungguhnya berawal dari ajaran Kristen yang mengajarkan bahwa berikan urusan agama pada pendeta dan biarkan urusan-urusan di luar agama diselesaikan dan diputuskan kepada pemerintah. intinya suatu usaha pemisahan secara ekstrem antara urusan agama dan negara. Keduanya dipisahkan secara diametral sedemikian rupa sehingga keduanya membentuk alur dan pola pikir sendiri-diri.

Filosofi pemisahan secara ekstrem ini berangkat dari pemahaman bahwa agama sebagai suatu sistem nilai tidak mungkin bisa menjawab problem kemoderenan dan kekinian yang dihadapi masyarakat saat ini. Agama dianggap basi dan kehilangan daya relevansinya, sehingga masyarakat sekularistik sudah tidak melihat agama sebagai suatu doktrin Tuhan yang suci dan langgeng, akan tetapi agama sudah dinilai sebagai suatu doktrin kolot yang terlalu hebat untuk dijadikan nilai dan pedoman hidup. Pernyataan ini sungguh tidak berlebihan dikarenakan melihat bukti yang telah dan tengah terjadi di masyarakat barat sekarang ini yang nyata-nyata telah meninggalkan nilai-nilai agamanya secara substansial dan formal. Lihat saja pernyataan-pernyataan bahwa "Tuhan telah mati". Pernyataan ini sungguh sangat bertentangan nilai-nilai dan prinsip-prinsip tauhid, yang merupakan dasar semua agama samawi

Sekularisasi dalam Konteks keindonesiaan

Usaha-usaha desakralisasi (sekularisasi) pemikiran dalam konteks keindonesiaan dalam setting sejarah Indonesia modern, tidak akan lepas dari pemikiran-pemikiran liberal yang dibawa oleh para ideolog dan pemikir Islam liberal yang mayoritas lulusan Amerika dan negara-negara barat yang kalau dikerucutkan mereka adalah sarjana-sarjana lulusan Perguruan Tinggi Islam seperti IAIN dan perguruan tinggi sejenis. Tentu tidak bijaksana berkesimpulan bahwa semua lulusan perguruan tinggi tersebut identik dengan pembawa sekularisasi, akan tetapi ada di antara lulusannya yang menjadi tokoh "sekularisasi" di Indonesia.

Perdebatan tentang paham kebangsaan, keislaman, dan kemoderenan, dan keindonesiaan sesungguhnya pernah terjadi pada dekade 70-an. Ketika itu Nurcholis Madjid menggagas ide "Islam yes partai Islam no". Ide ini bermaksud agar umat Islam tidak tergiring untuk memahami Islam sebagai suatu doktrin sempurna yang mengatur semua aspek prikehidupan berbangsa dan bernegara. Atau meminjam istilah Bung karno dengan sebutan "tangkap Api Islamnya", artinya umat islam jangan terjebak dengan formalisme dan bahasa-bahasa simbol yang berada dalam tataran permukaan saja, akan tetapi u,at Islam diharapkan memahami dan melaksanakan substansi Islam sebagai suatu nilai universal dan up to date.

Kalu coba dicemati, pemikiran sekularisasi Caknur dan kawan-kawan sesungguhnya tidak semuanya salah, jika dilihat secara menyeluruh, artinya minimal dari segi tujuan dan maksud baiknya memang usaha tersebut dimaksudkan untuk mencari format atau konsep, bahkan kontribusi pemikiran kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Islam untuk pandai-pandai mengambil sikap yang semoderat mungkin tanpa meninggal;kan

substansi ajaran islam. demikian kira-kira maksud kawan-kawan di Jarungan Islam Liberal (JIL) yang dapat saya pahami dan tangkap.

Tapi jika dilihat dari perspektif sosio-politik, kemunculan ide sekularisasi atau bahkan depolitisasi Islam di Indonesia tidak bisa lepas dari kebijakan politik orde baru yang tidak menginginkan munculnya politik aliran di Indonesia . Kekhawatiran ini barangkali disebabkan oleh pemahaman dan pola pikir pemimpin bangsa saat itu yang minim pemahaman agamanya, atau katakanlah Islam abangan. Sehingga politik aliran sangat tidak dikehendaki keberadaannya saat itu.

Hubungannya dengan ide sekularisasi dan depolitisasi Islam yang dilancarkan oleh Caknur saat itu adalah ada korelasi positif dan ada simbiosis mutualisme antara kebijakan politik pemerintah saat itu dengan ide sekularisasi Caknur. Maka terjadilah sekularisasi pemikiran di kampus-kampus yang pada akhirnya masuk ke pemikiran mahasiswa. Kondisi ini telah berlangsung lama hingga sekarang ini.

Inti dari ide sekularisasi Caknur dan paham Islam liberal yang getol disuarakan Ulil Abshar Abdalla adalah mengajak umat islam pada ruh dan substansi Islam. Substansi islam ini adalah nilai-nilai dasar Islam universal yang digali dari Al-Quran dan Sunnah. Kelompok ini menolak segala bentuk formalisme Islam dan simbolisme nilai-nilai Islam. Dalam politik misalnya mereka menolak keberadaan partai politik Islam, Bank Islam, kewajiban memakai jilbab bagi muslimah, dan idiom-idiom Islam lainnya.

Tampaknya ide ini agak kebablasan, ketika diskursus keislaman ini masuk pada tataran konsep dan definisi substantif.. Kita akan bingung memahaminya . Apakah memakai jilbab itu sesuatu yang substantif atau bukan. Jika bukan berarti tidak ada kewajiban memakai jilbab bagi muslimah, karena itu bukan substantif. Akan tetapi kewajiban itu adalah ada karena memakai jilbab adalah kewajiban substantif yang bersifat syariy. Di sinilah letak kebingungan kita memahami alur pemikiran Islam liberal.

Namun bagaimanapun sumbang pemikiran Caknur dan kawan-kawan lainnya di Paramadina misalnya sangat terasa dalam membangun demokratisasi, keadilan, pencerahan bangsa, dan sekali-kali menjadi oposisi pemerintahan. ini sisi positif dari mereka. Tentu tidak akan cukup waktu membicarakan hal ini di sini. Kita memerlukan waktu cukup lama untuk mengkajinya. Wallahu 'alam

MAKNA KUNJUNGAN PRESIDEN SBY KE PALESTINA

Kabar tentang rencana Presiden Susilo Bambang Yudoyono untuk mengunjungi negeri yang tak henti-hentinya bergolak, Palestina ini sungguh suatu kabar yang menggembirakan. Kunjungan ini memiliki makna yang strategis jika dikaitkan dengan perjuangan bangsa Palestina untuk membebaskan diri dari penindasan dan neokolonialisme zionisme Yahudi. Kunjungan ini pula merupakan jawaban atas keraguraguan komunitas umat Islam Indonesia yang concern dengan perjuangan bangsa Palestina selama ini.

Keragu-raguan ini muncul disebabkan kebijakan politik luar negeri pemerintahan Indonesia, sejak dicaploknya wilayah Palestina oleh Inggris yang kemudian "dihibahkan" kepada bangsa Yahudi, yang cenderung sangat lembek dan verbalistik. Pernyataan-pernyataan resmi yang sempat direkam dalam memori umat Islam Indonesia selama ini menyangkut nasib bangsa Palestina baru sebatas "pernyataan keprihatinan" dengan menggunakan kata-kata yang sangat lembut tak bergigi dan tidak ada gregetnya sama sekali. Memang itulah kenyataannya yang terjadi selama ini. Sangat disayangkan Indonesia sebagai suatu bangsa dan negara yang berdaulat dengan jumlah penduduknya yang mayoritas muslim, sesungguhnya bisa melakukan sesuatu yang bermakna dan bernilai, dan jangan hanya bisa melawan dengan pernyataan yang alakadarnya itu. memang, sekali lagi amat disayangkan.

Refleksi dukungan yang lebih tampak dan terasa justru datang dari elemen-elemen masyarakat Islam modernis, seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam, komponen mahasiswa Nahdatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, elemen-elemen mahasiswa Islam, lembaga swadaya masyarakat yang independen, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dan sebagian parpol Islam seperti PKS. Ormas-ormas inilah yang getol menyuarakan aspirasi, aksi turun ke jalan, aksi sosial kemanusiaan, dan pernyataan-pernyataan yang keras dengan kutukan, kecaman, dan bahkan anjuran boikot ekonomi.

Makna Kunjungan Presiden SBY

Ada nuansa lain yang bisa kita tangkap dari rencana kunjungan Presiden SBY ke Palestina kali ini. Nuansa itu adalah ada niat dan ijtihad politik Presiden SBY untuk dengan sungguh-sungguh memperlihatkan bahwa Indonesia sebagai suatu bangsa dan negara berada di belakang perjuangan bangsa dan rakyat Palestina yang sedang terjajah. Jadi ada keberpihakan yang sangat jelas dan kentara dari kunjungan kali ini. Boleh jadi ini merupakan manuver penting kebijakan politik luar negeri Presiden SBY yang akan mengubah citra Indonesia menyangkut perannya di percaturan politik dunia internasional.

Tentu terlalu dini untuk menilai apakah kebijakan politik Presiden SBY ini dengan sendirinya akan mengubah wajah kebijakan politik luar negeri Indonesia ke depan, akan memerlukan pembahasan dan kajian yang lebih mendalam untuk itu. Namun, bahwa kunjungan ini akan memiliki makna penting bagi perubahan nasib bangsa Palestina ke depan adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Di samping itu, akan muncul simpati dan prestise di kalangan dunia Islam bahwa Indonesia tercatat dalam sejarah diplomasi internasional sebagai sebuah negara yang Presidennya pernah berkunjung ke sebuah negeri yang tengah dilanda konflik dan kedatangannya ke negeri tersebut untuk mendukung perjuangan rakyat dan bangsa tersebut.

Langkah Presiden kita ini selayaknya mendapat penghargaan dan dukungan dari seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Kalangan media massa seyogianya membuat editorial yang isinya mendukung penuh langkah ini sebagai suatu usaha penciptaan publik opini di tengah-tengah masyarakat. Hal ini perlu dilakukam supaya masyarakat kita tahu bahwa Presidennya mendukung bangsa Palestina sekaligus sebagai suatu pemberitaan tentang keberadaan suatu bangsa yang masih terjajah secara sistematis oleh bangsa lain di tengah-tengah peradaban manusia yang modern ini. Sebab selama ini pemberitaan tentang derita umat Islam selalu terjadi reduksi-reduksi dalam pemberitaannya dan porsi yang kecil.

Misi Presiden SBY

Misi dan agenda penting Presiden SBY di Palestina tidak hanya sebagai kunjungan bilateral kedua negara saja, namun ada agenda politik yang tersirat dari kunjungan ini. Seperti yang diutarakan oleh Menlu RI Hasan Wirayuda (Satelitnews, 14 Juli 2005) bahwa kunjungan ini bermaksud untuk merefleksikan kesungguhan pemerintahan Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat dan bangsa Palestina untuk merdeka dan mendapatkan wilayah-wilayah Palestina yang sekarang masih diduduki Zionisme Israel.

Namun, tentu saja harapan kita dengan adanya kunjungan ini adalah ada pembicaraan dan komitmen yang jelas dari Indonesia untuk mempercepat penyelesaian konfliknya dengan Israel. Jadi harus ada agenda-agenda aksi yang kongkrit bagaimana langkah strategis agar dunia Islam lebih peduli dengan nasib bangsa Palestina. Hasil dari kunjungan ini handaknya dilanjutkan dengan mengusung ide besar sebagai suatu langkah awal mengusung aksi besar lanjutan. Sebut saja menggalang dukungan dunia Islam melalui lembaga Organisasi Konferensi Islam untuk membentuk tentara OKI misalnya atau ide-ide kreatif lainnya yang lebih faktual dan benar-benar dibutuhkan.

Inilah barangkali sebagian harapan yang bisa dikedepankan dalam kaitan rencana kunjungan Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono ke Palestina kali ini. Semoga angin perubahan dapat secepatnya membawa Palestina menjadi sebuah bangsa yang merdeka.

REVOLUSI UNTUK PARLEMEN KITA

Mukaddimah

Astagfirullah, rupanya ini yang bisa kita ucapkan. Saya, anda, dan siapa pun yang masih menyisakan hati nurani, akan batuk-batuk mendengar dan melihat pimpinan Parlemen yang *keukeuh* menaikkan tunjangan operasional sampai seratus persen di tengah-tengah seabreg permasalahan pelik yang menguntit bangsa dan rakyat Indonesia mulai dari krisis energi, pengangguran, kemiskinan struktural, kesempitan yang melanda para nelayan kita yang tidak mampu lagi melaut akibat kelangkaan BBM, ancaman disintegrasi bangsa di beberapa kawasan wilayah perbatasan kita dan lain-lain masalah yang terus mendera sendi-sendi ketahanan bangsa dan negara ini.

Kalau ada di antara kita yang hendak menangis, atau menangisi parlemen kita, janganlah dilakukan, karena walaupun persediaan air mata kita habis, gara-gara tangisan kita, toh keputusan kenaikan tunjangan itu telah disepakati dan tinggal dicairkan. Atau ada barangkali yang ingin sekedar menggelar aksi keprihatinan dengan turun ke jalan menolak kebijakan itu, jangan pula dilakukan, toh protes-protos kita itu sama sekali tak didengar. Seribu tangisan, seribu kritik, dan seribu protes tak akan jua mengubah semua ini, karena mata, hati, dan nalar mereka sudah tertutupi oleh belenggu keserakahan.

Kita, rakyat kecil akan bertanya-tanya apa sih alasan yang paling urgent dari niatan parlemen kita itu. Rasio dan hati nurani kita akan gagal memahami fenomena matinya hati nurani dan nalar sehat anggota parlemen. Protes dari sana-sini seolah tak digubris dan tak membuat mereka bergeming sedikit pun untuk sekedar berdialog dengan konstituennya pada pemilu kemarin. Kalau sudah begini, tidak ada lagi yang tersisa dari bangsa dan negara yang bernama Indonesia ini kecuali egoisme dan keserakahan. Lantas apa yang mesti kita lakukan sebagai tanggung jawab moral kita sebagai rakyat, pemilik bangsa dan tanah air ini sebagai wujud dari kedaulatan rakyat sesuai dengan faham demokrasi yang kita anut, atas semua carut marut kehidupan berkebangsaan ini ?

Revolusi, sudah waktunya ?

Ada baiknya kita merenung sejenak sebelum mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Ini penting untuk mengukur dan mencermati sejauhmana dampak yang akan timbul yang diakibatkan aksi-aksi kita. Demikian pula dengan kata revolusi. Apakah revolusi dalam artian sesungguhnya, yaitu aksi massal dengan turun ke jalan menuntut perubahan secara cepat, drastis, dan fundamental kepada penguasa, sudah saatnya dilakukan sekarang ini, atautkah kita memilih merekonstruksi jalannya reformasi yang telah mati ini. Atau mungkin kita hanya menunggu keadaan yang tidak jelas ini terus berlangsung sampai suatu ketika ada perubahan ke arah yang baik atau sebaliknya perubahan itu menuju jurang kehancuran?

Dalam konteks kenaikan tunjangan parlemen, seyogianya ada perubahan-perubahan mentalitas dan spiritualitas yang signifikan dari parlemen tentang apa dan siapa sesungguhnya parlemen itu jika kaitkan dengan hubungan kerakyatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Mestilah ada sedikit niat baik sebagai *husnul awwal* dari parlemen untuk mengubah citra kelebagaannya dari parlemen yang tidak berprestasi menjadi parlemen yang berprestasi. Keluarkan semua daya upaya dan kemampuan agar rakyat kita dapat melihat dan merasakan bahwa parlemen sungguh-sungguh, sekali lagi sungguh-sungguh bekerja untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rakyat kita tidak muluk-muluk dalam menaruh harapan kepada

parlemen. Mereka hanya ingin melihat parlemen kita bersih, amanah, sederhana, dan mampu menajdi contoh yang baik di tengah-tengah rakyatnya.

Rakyat kita akan merasa bangga memiliki parlemen dengan kriteria-kriteria seperti disebut di atas, meskipun hasilnya belum mengarah pada perbaikan ekonomi dan sosial mereka. Ini saja sudah merupakan suatu prestasi. Apalagi jika hal ini dilanjutkan dengan prestasi kerja yang benar-benar terasa langsung dalam kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Jadi intinya harus ada perubahan fundamental terhadap mentalitas dan cara pandang parlemen kita tentang keberadaan mereka di tengah-tengah prikehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah barangkali yang disebut dengan revolusi berfikir.

Revolusi berfikir ini mutlak dibutuhkan untuk mengantisipasi riak-riak gelombang frustrasi dan derita panjang rakyat kita yang sudah jenuh dan bosan dengan kondisi kemiskinan struktural yang melanda rakyat kita. Sebab jika kondisi ketidakpastian, kemiskinan, budaya korupsi, dan semua carut marut negeri ini terus menerus dipelihara tanpa dicarikan solusi yang cepat dan akurat, maka tidak mustahil rakyat akan muak, frustrasi, dan akhirnya terjadilah revolusi fisik. Ini semua tidak kita inginkan. Sebab bagaimana pun, revolusi akan memakan anaknya sendiri. Akan terjadi fitnah politik dan huru-hara sosial yang akan menghancurkan kehidupan masyarakat kita. Belum lagi dampaknya terhadap hasil-hasil pembangunan kita yang telah dirintis sekian lama dengan susah payah akan hancur dan kita semua kembali menjadi bangsa termiskin dan terbelakang. Dan semuanya harus dimulai dari nol.

Untuk menghindari itu semua, marilah kita merenung dengan sungguh-sungguh apa yang salah dari bangsa Indonesia selama ini, sehingga kita menjadi terpuruk terus menurun tanpa bisa berbuat banyak mengejar ketertinggalannya dari bangsa yang lain. Sedangkan usia kemerdekaan kita sudah 60 tahun, tapi mana hasil-hasil pembangunan selama masa kemerdekaan itu?

Sebelum semuanya menjadi sangat terlambat, ada baiknya kami sarankan kepada parlemen, bapak-bapak kami yang terhormat untuk sekali lagi memahami kondisi masyarakat kita yang tengah berada dalam kesulitan. Kami harus menghenmat BBM, menghemat listrik, batal melaut bagi para nelayan miskin yang benar-benar mengandalkan kehidupannya pada laut, banjir, busung lapar, fenomena gizi buruk, dan masalah-masalah kerakyatan lainnya yang nyata-nyata terjadi di tengah-tengah kehidupan kami.

Khatimah

Inilah barangkali harapan-harapan kami rakyat kecil yang sungguh-sungguh mengharapkan terjadinya perubahan sikap mental parlemen kita. Semua harapan ini bukanlah sekedar kritik belaka yang tidak ada artinya, akan tetapi datang dari hati nurani dan kenyataan yang kami alami.

POLEMIK PARTAI LOKAL

Mukaddimah

Semoga ide pembentukan partai lokal yang digagas pihak juru runding Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki Finlandia tempo hari benar-benar suatu sintesis dari kemelut berkepanjangan antara pemerintah Republik Indonesia dengan GAM. Ide ini harus benar-benar menyudahi semua konflik panjang dan berhasil membawa kedua belah yang berseteru ke dalam suatu perdamaian yang hakiki dan tidak menimbulkan konflik-konflik berkelanjutan di kemuadiah hari.

Ide partai lokal ini seyogianya direspon dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah Republik Indonesia dengan terlebih dahulu melakukan analisis mendalam, cermat, akurat dan tentu saja menyeluruh. Ini penting untuk mengantisipasi dampak dari perberlakuan partai lokal ini, jika ide ini benar-benar dilaksanakan. Kemunculan ide partai lokal dari pihak GAM semoga benar-benar menyiratkan keinginan kuat untuk berdamai, dan bukan semata-mata jalan keluar sesaat untuk menghindari kebuntuan atau bukan semacam test case yang tidak lebih dari sekedar upaya politis dan diplomatis semata-mata.

Plus Minus Partai Lokal

Terus terang ide partai lokal merupakan ide brilliant yang tidak teroikirkan sebelumnya. Ide ini memiliki dua mata pisau yang berpotensi menguntungkan sekaligus merugikan bagi kelangsungan masa depan nanggroe Aceh Darussalam khususnya dan Bangsa/Negara Indonesia pada umumnya. Ide ini harus dicermati dengan seksama dengan terlebih dahulu melakukan kajian mendalam dan menyeluruh. sebab jika salah dalam mengambil kebijakan dan keputusan, maka yang akan terjadi adalah kehancuran yang tidak saja melanda Aceh tapi juga dapat dipastikan akan merembet pada negara kesatuan republik Indonesia. Jadi akan terjadi sindrom kehancuran wilayah.

memang ada manfaat dari dimunculkannnya ide partai lokal yang salah satu di antaranya adalah usaha untuk memecah kebekuan perundingan diplomasi antara kedua belah pihak. jadi ada semacam pencerahan atau colling down dari ketegangan diplomasi. Minimal ada secercah harapan kecil untuk membuka jalan damai yang menguntungkan kedua belah pihak. Meskipun perundingan ini belum menyentuh hal-hal yang paling fundamental yang justru hal ini sangat ditunggu-tunggu oleh banyak pihak.

Keuntungan lainnya adalah munculnya spirit optimisme dengan segala dampak positifnya jika kedua belah pihak benar-benar secara serius berkeinginan untuk terus menerus mau maju ke meja perundingan demi masa depan rakyat Aceh. Ini sangat diperlukan untuk membangun rasa optimisme rakyat Aceh yang sudah compang camping didera ketidakpastian hukum dan keamanan sekian lama, mulai dari pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM), pemberlakuan darurat militer, perpecahan dan konflik masyarakat akibat aksi GAM, belum lagi trauma bencana alam tsunami, dan masalah-masalah kemanusiaan lainnya yang membuat mereka lelah dan cape berada dalam kubangan keputusan tak terbatas.

Semua persoalan di atas seharusnya menjadi spirit pihak-pihak yang bertikai di Aceh untuk sesegara mungkin mengakhiri semua kekerasan dan tragedi kemanusiaan yang muncul sebagai

akibat langsung atau pun tidak langsung dari konflik ini. Sekarang ini Aceh tengah porak poranda secara fisik dan mental. negeri ini seolah tak henti-hentinya bergolak mulai peristiwa Darul Islam (DI), Tentara Islam Indonesia (TII), PRRI Permesta, DOM, dan lain sebagainya. Kondisi kekerasan ini jangan terus dibiarkan tanpa dicarikan solusi menyeluruh untuk menyelamatkan rakyat dari trauma psikologis yang menghantui mereka sejak lama. Dalam konteks inilah, kemunculan ide partai lokal ini setidaknya bisa memecah kebekuan perundingan untuk suatu ketika benar-benar terwujud suatu perdamaian.

Namun tentu saja ide partai lokal juga mengandung benih-benih radikalisasi kepartaian. Artinya akan muncul rasa kebanggaan dan kecintaan yang berlebihan dari para pendiri partai lokal di Aceh. Ini wajar karena mereka merasa bahwa keberadaan partai mereka hanya eksis di daerahnya. Radikalisasi kepartaian ini juga akan memicu ketegangan baru di daerah Aceh. Sebut saja partai A yang memiliki basis massa GAM akan dapat dipastikan potensial untuk berhadapan dengan partai B yang memiliki basis massa Non GAM. Kondisi ini sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, perlu ada kajian menyeluruh demi keselamatan dan masa depan perundingan RI-GAM ke depan.

Ide pendirian partai lokal juga bisa menjadi wadah para pejuang GAM untuk berlindung di balik keberadaan perjuangan mereka. Jadi, lewat kedok partai, mereka akan berusaha menjalankan program dan aksinya dengan leluasa. Keberadaan partai lokal hanya sebagai kendaraan politik saja untuk semata-mata membesarkan mereka. Ini juga perlu menjadi pertimbangan pemerintah pusat apakah keberadaan partai lokal itu memberikan arah menuju kemajuan perundingan atau justru sebaliknya mendatangkan kerugian.

Satu lagi yang harus diwaspadai bahwa bisa saja daerah-daerah lain akan menuntut hal yang sama kepada pemerintahan pusat. dengan alasan bahwa ada jaminan tidak akan ada disintegrasi bangsa nantinya, mereka akan menuntut didirikannya partai lokal. Ini yang akan menjadi kontra produktif. Jika di Aceh jadi berlaku partai lokal dan terjadi radikalisasi kepartaian, maka kebijakan politik pemerintah tentang ini harus dibayar mahal dengan akan terjadinya tuntutan pemisahan wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika hal ini terjadi, siap-siap saja wilayah lain akan melakukan hal yang sama.

Khatimah

Oleh karena itu, hendaknya pemerintahan pusat jangan menjadikan usulan pendirian partai lokal semacam test case semata-mata, akan tetapi hendaknya mengkaji secara mendalam dan menyeluruh dampak-dampaknya bagi kelangsungan dan masa depan Aceh dan masa depan Indonesia. Sebab jika salah mengambil kebijakan dan keputusan politik, maka kehancuran dan disintegrasi bangsa tak mustahil akan terjadi. Jangan sampai sindrom Yugoslavia dan Uni Soviet terjadi di Negeri kita yang tercinta

MEMBANGUN JIWA INTERPRENEURSHIP

Gerak maju suatu bangsa tidak bisa lepas dari penanaman Mentalitas individu sebagai penghuni syah dari suatu wilayah yang berdaulat. Sungguh penting keberadaan suatu komunitas masyarakat jika dikaitkan dengan keberadaan dan keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Apa artinya suatu bangsa dan negara tanpa keberadaan suatu individu yang membentuk satu kesatuan masyarakat yang mendiaminya. Dalam konteks kemajuan suatu bangsa dan negara, peran sentral masyarakat adalah suatu keniscayaan, artinya kemajuan suatu bangsa dan negara dibentuk oleh peran maju rakyat dan masyarakat yang menghuninya.

Hampir dapat dipastikan bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki rakyat dan masyarakat yang berpikiran maju. Masyarakat yang berpikiran maju adalah masyarakat yang memiliki pola pikir dan mentalitas yang tangguh, ulet, rajin, pantang menyerah, berdedikasi tinggi, dan mandiri. Jepang misalnya adalah suatu bangsa yang memiliki sifat-sifat dan kriteria-kriteria di atas. Mereka rajin, ulet, pantang menyerah, tidak malas, dan mandiri. Perekonomian mereka telah menghantarkan mereka menjadi salah satu negara termaju di dunia dengan industri otomotif dan elektronika meskipun tidak didukung oleh ketersediaan sumber daya alam. Oleh karena itu, sudah satnya kita meniru langkah-langkah, mentalitas bangsa Jepang demi kemajuan kita di kemudian hari.

Salah satu kunci keberhasilan bangsa-bangsa yang maju dan yang pernah maju di dunia ini adalah keberhasilan mereka membangun jiwa kewirausahaan (interpreneurship). Dengan jiwa dan mental wirausaha ini rakyat akan giat berpikir dan berjuang setiap harinya untuk terus menjalankan usaha dan produksi dengan kekuasaan dan kedaulatan penuh di tangannya. Orang-orang yang terbiasa melakukan usaha di bidang ini, mereka akan sangat akrab dengan kemerdekaan untuk melakukan ekspansi usaha sekaligus menjalankan kebijakan-kebijakan produksinya dengan penuh tanggung jawab.

Untuk konteks Indonesia, jiwa kewirausahaan ini masih sangat lemah. Masyarakat kita masih terjangkiti oleh doktrin-doktrin lama yang sudah usang dan tidak fleksibel. Orang tua kita masih menekankan dan mendorong anak-anaknya untuk menjadi pegawai negeri . Walaupun untuk mencapai tujuan dan cita-citanya harus menempuh cara-cara yang tidak terpuji. Tujuan dan cita-cita untuk menjadi pegawai, tentu bukanlah salah, akan tetapi jika hal ini menjadi tujuan yang harus terlaksana, maka pola pikir seperti ini harus sudah diakhiri, karena pemikiran seperti ini akan mendorong masyarakat pada suatu pola pikir yang keliru. Keliru dalam artian bekerja sama dengan pegawai negeri. Jika pengidentikan ini dianggap suatu kebenaran, maka sama dengan mematikan terjadinya pencarian peluang dan usaha lain yang justru di sinilah banyak terbukanya lapangan kerja.

Contohnya Nabi Muhammad SAW., Beliau dididik dan dibesarkan dalam suasana dan jiwa kewirausahaan yang kental. Bahkan sejak kecil beliau sudah dididik untuk mengelola gembala yang dipercayakan kepadanya untuk mengurus, memberi makan, mengasuh, dan mengobatinya jika ada gembalaannya yang sakit. Itu semua menghantarkan beliau menjadi seorang saudagar yang sukses. Jiwa kewirausahaan beliau itu tampak dari beberapa lawatan dan misi dagang yang dilakukannya ke beberapa negeri di luar Quraisy saat itu, di antaranya ke Sam, Yaman, dan Yordania. Bukti sejarah ini semakin menguatkan beliau sebagai seorang saudagar yang sukses. Bahkan beliau menggantungkan hidupnya sebagai seorang usahawan.

Dalam jiwa kewirausahaan terkandung banyak nilai luhur yang patut dipelihara sebagai pedoman hidup kita untuk maju. Nilai-nilai luhur tersebut seyogianya dilaksanakan dengan

penyuh keihlasan sebagai suatu pengamalan ibadah kepada Allah SWT. Di antara nilai-nilai luhur tersebut adalah :

Pertama, Kemandirian. Nilai ini mendorong seseorang untuk maju dengan membawa segala tanggung jawab yang benar-benar lepas dari intervensi pihak lain. Berbeda dengan profesi lain yang relatif memiliki dependensi yang tinggi. Profesi dagang misalnya benar-benar memiliki tingkat independensi yang tinggi. Bagaimana seorang pedagang yang mencari modal sendiri, mengelola sendiri, memproduksi, dan mendistribusikan hasil usahanya dengan tangan sendiri. Jadi benar-benar memupuk semangat kemandirian yang sangat tinggi dibanding dengan jenis profesi yang lain.

Kedua, Kejujuran. Jiwa entrepreneurship juga mengajarkan kita untuk bersikap dan berperilaku jujur. Kejujuran dalam menjalankan usaha ini sangat diperlukan dan bahkan menentukan sukses dan tidaknya usaha yang dijalankan. Dalam kejujuran juga tersimpan sifat amanah. Dua sifat ini adalah bagai dua sisi mata uang yang jika salah satunya hilang, maka dapat dipastikan satu yang lainnya menjadi hilang.

Ketiga, Disiplin. Disiplin adalah sesuatu nilai yang mahal sekali di negeri ini. Disiplin menjadi nilai senantiasa didengungkan, akan tetapi sekaligus juga menjadi nilai yang sangat rentan untuk ditinggalkan. Dalam menjalankan usaha, disiplin dan janji merupakan dua hal yang akan sangat menentukan keberhasilan dalam melaksanakan usaha, terlebih-lebih lagi dalam melalui hidup. Jika disiplin sangat dibutuhkan, bahkan merupakan kunci sukses dalam melaksanakan usaha, apalagi dalam melalui hidup ini.

Keempat, Kreatif dan inovatif. Dalam melaksanakan profesi yang berhubungan dengan wirausaha, sikap kreatif dan inovatif sangatlah dibutuhkan. Karena jenis profesi ini sangat bergantung pada perubahan dan mode yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat (konsumen), maka perubahan dan dinamika yang ada dan tengah terjadi di tengah masyarakat tersebut harus dapat dibaca dan direpson sedemikian rupa oleh orang-orang yang bergelut dalam bidang usaha ini. Jika dalam melaksanakan usaha ini tidak pandai-pandai melakukan inovasi, maka konsumen akan serta merta meninggalkan kita. Jadi kreatifitas dan inovasi dalam usaha ini benar-benar dibutuhkan. Begitu pula dalam hidup. Perubahan sosial sudah menjadi sunnatullah dan keniscayaan. Kita semua dituntut untuk senantiasa berubah menuju sesuatu yang lebih baik di kemudian hari. Nah orang yang bergelut dalam jiwa kewirausahaan akan senantiasa siap merespon segala perubahan dalam hidup ini, karena mereka sudah sangat biasa menghadapi perubahan-perubahan yang dihadapinya ketika mereka menjalankan usahanya.

Itulah barangkali beberapa nilai-nilai luhur yang seyogianya dapat memicu dan memacu kita untyuk terjun menjadi seorang pelaku wirausaha. Yak inilah bahwa jenis profesi ini tidak hanya dapat mendorong kita menjadi seorang yang sukses dalam materi, juga dalam jenis profesi ini pula terkandung nilai-nilai luhur yang akan menghantarkan kita pada kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat. Wallahu 'alam

OTORITAS MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

Insiden pengepungan kampus Al-Mubarak Parung Bogor yang merupakan pusat kegiatan Jema'at Ahmadiyah Indonesia sekitar tiga pekan yang lalu oleh komunitas muslim Indonesia, telah memunculkan beberapa persoalan keagamaan, keindonesiaan, dan prikehidupan kebangsaan kita. Betapa tidak, insiden ini tidak hanya menimbulkan ketegangan antara kedua belah pihak yang bertikai saja, akan tetapi insiden ini pula kembali menguak sejarah tentang kedudukan Ahmadiyah secara hukum dan akidah Islam. Belum lagi selesai masalah ini, lantas bagaimana sikap dan tindakan pemerintah terhadap persoalan ini. Karena landasan hukum (yuridis formal) yang mengatur masalah ini jelas tidak ada. Sedangkan sikap tegas pemerintah sangat dibutuhkan demi terciptanya stabilitas nasional.

Pro-kontra tentang keberadaan Ahmadiyah Indonesia, tidak hanya terjadi pada tataran teologis saja, akan tetapi menyangkut pula sikap dan tindakan yang harus diambil terhadap golongan ini. Polemik dalam tataran teologis dipicu oleh salah satu doktrin (ajaran) Ahmadiyah Qodiyani yang mengajarkan bahwa Mirza Gulam Ahmad adalah nabi terakhir. Dengan demikian Nabi Muhammad bukanlah nabi terakhir yang diutus Allah, karena masih ada satu nabi lagi, yaitu Mirza Gulam Ahmad yang tiada lain nabinya jemaat Ahmadiyah. Di samping itu, jemaat Ahmadiyah pun memiliki kitab suci lain. Jadi ada semacam Al-Quran versi Ahmadiyah. Inilah yang menjadi dasar penolakan sebagian besar umat Islam Indonesia terhadap keberadaan Jemaat Ahmadiyah. Hal ini tercermin dari pernyataan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsudin. Beliau menyatakan bahwa silahkan Ahmadiyah membuat agama baru dan jangan membawa-bawa Islam, karena doktrin dan ajaran mereka sudah di luar akidah Islam.

Pernyataan Din Syamsudin ini sangat bijak sekaligus tegas sekali. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa umat Islam tidak bisa menerima perbedaan ajaran yang datang dari Ahmadiyah semata-mata karena perbedaan itu sudah masuk pada tataran keimanan. Keyakinan mayoritas umat Islam di Indonesia adalah bahwa Nabi Muhammad SAW itu nabi yang terakhir, tidak ada dan tidak akan pernah ada lagi nabi yang diutus Allah setelah Beliau. Titik! Kalau kemudian ada orang yang ngaku-ngaku seorang nabi adalah jelas bohongnya. Apalagi kemudian sang nabi palsu ini mengaku menerima wahyu. Ini jelas sesat dan menyesatkan. Jika paham ini dibiarkan, maka dikhawatirkan akan muncul orang-orang yang mengaku nabi yang kemudian menyebarkan di tengah-tengah umat Islam. Dan jika suatu pemahaman sudah menjadi doktrin dan menideologi, maka akan susah dihilangkan karena ideologi itu tak akan pernah mati.

Namun, tidak semua tokoh Islam menolak keberadaan Ahmadiyah. Dengan dalih humanisme, pluralisme keberagamaan, dan toleransi intern umat beragama, Azyumardi Azra, Abdurrahman Wahid, dan Ulil Abshar Abdalla kembali menyuarakan pembelaannya. Tiga tokoh ini meminta umat Islam yang menolak Ahmadiyah untuk menerima perbedaan tersebut, karena negara Indonesia adalah bukan negara yang berazaskan Islam, tapi negara yang berhaluan nasionalisme. Lantas Gusdur dan Azyumardi meminta MUI untuk meninjau kembali fatwa MUI yang menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah aliran sesat dan menyesatkan.

Tampaknya pernyataan dan permintaan Gusdur dan Azyumardi Azra untuk kali ini berlebihan. Betapa tidak, alih-alih pencerahan yang mestinya diberikan kepada umat, kok malah kekeruhan yang dimunculkan. Saya tidak tahu bagaimana reaksi mereka yang mendukung keberadaan Ahmadiyah jika ternyata tiba-tiba anak atau adiknya seorang Ahmadiyah yang membawa kitab suci versi Ahmadiyah. Apakah mereka akan membiarkannya, atau mendukungnya, atau melarangnya. Saya yakin akan dilarang. Lawong mereka tahu bahwa

perbedaan dalam hal ini bukan perbedaan fikih yang bisa ditolelir, akan tetapi perbedaan akidah yang tidak bisa ditolelir. Oleh sebab itu maaf, bukan fatwa MUI yang harus ditinjau, akan tetapi pernyataan anda-andalah yang harus ditinjau.

Kemudian, Kalau Gusdur dan Azra tidak setuju dengan fatwa MUI yang melarang Ahmadiyah hidup di Indonesia, lantas kenapa harus fatwa MUI yang ditinjau, buat fatwa baru saja versi Gusdur-Azra. Kenapa demikian, karena sudah menjadi kewajiban dan kemestian bahwa MUI harus pro aktif memberikan wejangan, nasehat, fatwa kepada umat dalam rangka penegakkan nilai-nilai Islam di tengah-tengah masyarakat Islam, sekali lagi masyarakat Islam bukan masyarakat Indonesia. Jadi ada semacam *delegation of authority* yang diberikan oleh Masyarakat Islam kepada MUI untuk membimbing mereka dari kesesatan akidah yang lurus. Justru aneh kalau kemudian ada tokoh yang mencoba mengusik otoritas MUI dengan fatwanya. Silahkan saja Gusdur membuat fatwa sendiri, semacam fatwa tandingan. Dan tidak usah meminta MUI menarik atau meninjau fatwanya. Namun apa fatwa Gusdur itu nantinya "laku" atau tidak. Jangan-jangan tidak laku seperti tidak lakunya pernyataan Gusdur tentang halalnya salah satu produk penyedap rasa ketika ia masih menjabat presiden. Kebetulan fatwa Gusdur kala itu bersebrangan dengan fatwa MUI.

Sikap pemerintah sendiri terkesan gamang dalam menyikapi masalah Jemaat Ahmadiyah ini. Kegamangan ini muncul dikarenakan tidak adanya landasan yuridis formal yang bisa dijadikan payung hukum oleh pihak berwenang yang dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan dalam mengambil tindakan. Artinya pihak kepolisian dan kejaksaan tidak bisa melarang kegiatan Ahmadiyah semata-mata dengan alasan fatwa MUI saja. Karena fatwa itu hanya berlaku untuk intern umat Islam. Namun lain halnya jika ada Undang-Undang yang mengaturnya. Pihak yang berwenang bisa lebih tegas dalam mengambil tindakan. Jadi keberadaan pihak kepolisian di tengah-tengah insiden kampus Al-Mubarak saat itu semata-mata untuk menenangkan suasana, dan bukan bermaksud menangkap Jemaat Ahmadiyah.

Namun, meskipun kita tidak setuju dengan keberadaan jemaat Ahmadiyah di Indonesia, tetap saja kita harus mengedepankan cara-cara yang santun dalam mengambil tindakan. Hal ini perlu disampaikan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sikap anrkis apapun alasannya tetap tidak bisa dibenarkan oleh Islam meskipun niat dan tujuannya baik. Sebab pengerahan massa secara besar-besaran apalagi dengan membawa senjata tajam akan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu marilah kita carikan solusi yang tepat dan akurat untuk menghasilkan sesuatu yang diharapkan tanpa menimbulkan riak gelombang keresahan di tengah-tengah masyarakat.

TANGGAPAN JIL DAN KOMNAS HAM TENTANG FATWA MUI, SEKEDAR SENSASI

Masih ingat perang fatwa antara Gusdur dan MUI tahun 2001 tentang hukum salah satu produk penyedap rasa ? Kala itu, MUI menfatwakan haram, karena produk penyedap rasa itu mengambil manfaat (intifa') dari daging babi yang diharamkan Islam, meskipun tidak secara langsung produk penyedap rasa itu bahannya terbuat dari daging babi. Nah Gusdur, yang saat itu menjabat Presiden RI berpendapat sebaliknya. Ia mengatakan halal. Tapi bagaimana respon masyarakat? Masyarakat lebih memilih dan melaksanakan fatwa MUI dari pada pendapat Presidennya sendiri. Sayang saat itu belum ada JIL, kalau ada JIL pasti lebih seru. Karena mereka pasti dukung Gusdur.

Nah, sekarang silahkan saja Gusdur, JIL, KOMNAS HAM bikin fatwa aja. Toh produk fatwanya untuk intern umat Islam kok. Jangan khawatir muncul disintegrasi bangsa lah. Kemudian kita lihat, respon masyarakat bagaimana. Pasti fatwa mereka gak laku.

perlu disadari bahwa MUI bergerak dengan pemahaman akidah dan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang duduk di struktur MUI itu kan representasi dari keberadaan umat Islam di Indonesia. Makanya fatwa MUI adalah fatwa umat Islam Indonesia secara mayoritas. Otoritas fatwa MUI diberikan dan datang dari masyarakat. Rasional kan? ilmiah kan? tidak ngawur kan? tidak tolol kan?

Jadi, hanya masyarakat Islam yang bisa menilai, mencabut, mengkritik dan membatalkan fatwa itu. Apalagi komnas HAM. Anda mendingan mengurus pelanggaran HAM tanjung priuk aja. Atau Semanggi 1 dan 2. Atau insiden TIMTIM, atau kasus UDIN, Marsinah, TKI indonesia di luar negeri. itu dulu urusin, jangan ngurusin fatwa MUI. eh lebih baik MUI itu selamanya swasta tidak digaji. Biar ALLAH SWT yang menggajinya. Mereka itu ikhlas, pejuang, bersih, Hanya Tuhan yang bisa "menjamah" dan "mengubah" fatwa MUI !

ISLAM DAN PLURALISME AGAMA

Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya untuk bertauhid kepada Allah SWT. Tauhid di sini tidak hanya mempunyai pengertian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah saja, akan tetapi bagaimana semua yang telah Allah SWT tetapkan yang berupa kaidah-kaidah tentang akidah, syariah, akhlak itu menjadi ruh yang mampu menggerakkan semua gerak langkah setiap hambanya. Dengan demikian manusia yang bertauhid adalah manusia yang telah benar-benar menjadikan Allah sebagai tujuan dari sholat, ibadah, hidup, dan matinya. Inilah totalitas penghambaan manusia muslim. Semuanya harus mengarah ke satu titik, yaitu tauhidullah.

Doktrin tauhid ini merupakan salah satu dimensi yang paling fundamental dan juga merupakan aspek paling transenden dari Islam. Tauhid adalah ikrar pengakuan bahwa hanya Allah yang wajib disembah dan yang wajib dipertuhankan. Insan yang bertauhid haram menyembah pada selain Allah dan haram pula mempertuhankan kepada selain Allah. Begitu sangat sentral dan essensialnya makna tauhid ini, sehingga insan yang melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tauhid ini dihukumi syirik. (musyrik), yaitu predikat bagi perbuatan atau orang yang melakukan penyekutuan terhadap ketuhanan Allah SWT. Dalam Islam, dosa syirik termasuk dosa yang tidak akan diampuni Allah SWT.

Islam juga adalah sistem nilai kehidupan yang universal, relevan, fleksibel, atau yang lebih simpel disebut dengan rahmatan lil'alam. Universal (syumuliy) artinya nilai-nilai Islam itu berlaku untuk semua suku, bangsa, dan semua wilayah di dunia ini. Dengan demikian Islam tidak hanya berlaku bagi orang timur saja atau untuk orang Asia saja, akan tetapi Islam berlaku juga untuk orang Eropa, Amerika, Australia, dan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu keliru jika ada yang mengatakan bahwa Islam itu milik orang Arab saja. Ini jelas suatu pendapat yang tidak benar, karena Islam bukanlah agama yang parsial. Relevan artinya Islam senantiasa melekat untuk dapat bisa dilaksanakan dalam setiap kurun, zaman dan waktu. Islam bukanlah sistem nilai yang basi yang kehilangan daya relevansinya. Sedangkan fleksibel artinya Islam tidaklah kaku dalam memahami perkembangan zaman. Islam senantiasa bisa merespon problem-problem kekinian dan kemandirian.

Islam sebagai agama wajib diyakini kebenarannya oleh setiap muslim. Bahkan setiap muslim wajib pula meyakini bahwa hanya Islamlah agama yang paling diridoi Allah SWT., dan setiap muslim tidak boleh memiliki keragu-raguan sedikit pun tentang kebenaran Islam. Tentu doktrin

ini tidak berarti bahwa Islam menyuruh umatnya untuk membenci atau mencela agama dan pemeluk agama lain. Dalam hal ini sikap Islam jelas sekali bahwa bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dengan demikian Islam sangat toleran dengan keberadaan agama lain di luar Islam tanpa mengorbankan atau membiaskan keyakinan akan kebenaran Islam.

Pluralisme Agama

Pluralisme agama atau dalam istilah lain disebut dengan *wihdatul adyan* adalah pemahaman yang mengajarkan bahwa semua agama itu benar. Pemahaman ini dilatarbelakangi oleh suatu asumsi yang mengatakan bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, keadilan, perdamaian, ketertiban, dan nilai-nilai kebenaran yang lainnya, dan tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan kejelekan, kejahatan, kemunkaran, dan nilai-nilai tercela lainnya. Atas dasar ini, para ideolog pluralisme berkesimpulan bahwa semua agama benar. Sebagai contoh simpel adalah kalau kita hendak pergi ke Jakarta misalnya, maka tentu saja kita dapat melalui semua trayek atau jalur yang dengan jalur itu kita dapat sampai ke kota Jakarta, tanpa mempersoalkan jalur mana yang akan kita lewati, yang penting kita sampai ke tujuan. Secara selintas ilustrasi ini dapat diterima oleh akal sehat kita. Namun analogi ini tidak bisa diterapkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan keimanan (keyakinan). Untuk hal-hal yang lain barangkali bisa, namun untuk masalah-masalah teologis seperti ini, tentu saja suatu kekeliruan yang fatal.

Oleh karena itu, tepat sekali apa yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang haramnya pluralisme agama. Fatwa ini sungguh sangat berarti bagi perkembangan akidah umat Islam di Indonesia. Fatwa ini benar adanya bahwa pengakuan atas kebenaran agama lain itu dilarang dalam Islam. Tapi bukan berarti bahwa Islam tidak mengakui keberadaan agama lain di luar Islam. Islam mengakui keberadaan agama lain di luar Islam, tapi tidak serta merta mengakui kebenaran agama lain. Ini penting dijelaskan dan disosialisasikan di tengah-tengah umat Islam demi menjaga akidah umat dari kekeliruan pemahaman akidah yang lurus.

Mengakui kebenaran agama lain di luar Islam (pluralisme agama) dengan mengakui keberadaan agama lain di luar Islam (toleransi) merupakan dua hal yang berbeda. Kalau yang pertama artinya di samping kita mengakui kebenaran agama Islam sebagai agama yang kita yakini, kita juga mengakui kebenaran agama lain yang orang lain yakini. Sedangkan yang kedua, Kita hanya meyakini agama Islam sebagai agama yang paling benar dan tidak mengakui kebenaran agama lain di luar Islam. Oleh sebab itu, pluralisme dilarang dalam Islam. Sedangkan toleransi merupakan suatu kewajiban yang harus senantiasa dipelihara.

Dengan adanya toleransi diharapkan tetap terjaga keyakinan penganut suatu agama sekaligus tetap terpeliharanya kerukunan antar penganut agama. Jadi toleransi merupakan satu kode etik kehidupan beragama yang harus senantiasa dijaga, dipelihara, dan terus ditumbuh kembangkan dengan cara dialog antar umat beragama. Namun jika toleransi hendak diganti dengan pluralisme, maka yang akan terjadi adalah pendangkalan akidah di tengah-tengah penganut salah satu agama.

Jika para penganjur pluralisme beralasan bahwa ide ini digulirkan untuk meminimalisir atau mengikis tumbuhnya radikalisme Islam, maka saya pikir ini sebuah kekeliruan besar. Munculnya "radikalisme" atau "fundamentalisme" Islam harus dilihat sebagai suatu respon sebagian kecil umat Islam yang masih dangkal dalam memahami Islam yang sebenarnya. Kelompok ini perlu digiring menuju suatu pemahaman yang sesungguhnya apa itu Islam. Alhasil perlu suatu usaha dakwah Islam yang sistematis dan terpola dengan baik supaya pemahaman dan pesan Islam yang lurus benar-benar sampai pada mereka. Untuk itu tidak perlu lagi kampanye pluralisme agama. Karena tidak akan berhasil menyentuh kelompok ini. Alih-alih pencerahan yang ingin dicapai, malah pendangkalan akidah nantinya yang akan muncul.

Untuk itu, saya menyeru kepada kelompok Jaringan Islam Liberal, Islam Progressif, dan para penganjur pluralisme lainnya untuk segera menghentikan "dakwahnya" demi kepentingan umat Islam secara keseluruhan. Ini penting dikemukakan untuk mengantisipasi keresahan dan kekhawatiran para tokoh Islam lainnya. Apalagi jika dikaitkan dengan kondisi masyarakat Islam Indonesia saat ini yang tengah didera berbagai persoalan pelik menyangkut akhlak, kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Oleh karena itu, alangkah arifnya jika energi yang ada hendaknya disalurkan pada sesuatu langkah yang lebih strategis bagi kemajuan ummat ini. Wallahu 'alam

PILKADA DAN PROSES TRANSFORMASI DEMOKRASI

Mukaddimah

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) secara langsung yang tengah berlangsung hampir di seluruh penjuru tanah air merupakan suatu langkah maju dalam berdemokrasi. Proses ini layak mendapat dukungan semua pihak terutama warga masyarakat sebagai yang memiliki kedaulatan sesungguhnya (lihat UUD 1945). Apapun hasilnya dan Bagaimanapun kualitasnya, sebagai bangsa yang masih belajar berdemokrasi (*beginner in democracy*), harus diterima dengan penuh besar jiwa oleh semua komponen bangsa dengan tidak mengenyampingkan usaha-usaha perbaikan dan evaluasi untuk pelaksanaan PILKADA ke depan.

PILKADA adalah suatu bentuk perwujudan demokrasi langsung yang penerapannya baru terjadi sekarang ini di Indonesia. Salah satu filosofi dilaksanakannya PILKADA langsung adalah mengurangi subjektifitas keberpihakan anggota dewan. Di samping juga sebagai suatu usaha meminimalisir peluang terjadinya politik uang. Alhasil PILKADA ini merupakan suatu ide luhur yang harus disukseskan oleh semua pihak.

Satu lagi yang sangat bernilai dari PILKADA langsung ini adalah keinginan pemerintah dan kalangan legislatif untuk sungguh-sungguh menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Artinya dengan PILKADA ini peran rakyat lebih mengemuka dengan diberikannya keleluasaan bagi masyarakat yang telah memiliki hak suara untuk memilih calonnya secara langsung. Ini barangkali nilai lebih dari sistem pemilihan kepala daerah langsung kali ini.

Problem Pilkada Langsung

Satu hal yang selalu menjadi kekhawatiran kita semua ketika melewati suatu proses demokrasi yang melibatkan warga masyarakat, apalagi proses tersebut adalah sesuatu yang baru, adalah konflik horisontal antar warga masyarakat yang memiliki perbedaan kepentingan politik. Kekhawatiran ini jelas sangat beralasan mengingat bangsa ini sangat rentan dengan kekerasan dan anarkisme akibat proses pendidikan politik yang mandeg. Mandeg secara pemikiran dan nalar, juga mandeg secara psikologis. Sehingga setiap kali terjadi gesekan yang diakibatkan perbedaan kepentingan politik praktis, setiap kali itu juga terjadi konflik antar pendukung tokoh yang yang didukungnya.

Lihat saja bukti di lapangan, bagaimana runyamnya konflik yang terjadi antara kubu Nurmahmudi Ismail dari Partai Keadilan Sejahtera dengan kubu Badrul Kamal yang didukung Golkar. Konflik ini seolah menjadi cermin dari realitas sikap mental masyarakat kita yang sangat kekanak-kanakan dalam menyikapi problem konflik politik. Nalar, etika, dan nilai kebersamaan kita sebagai suatu bangsa seolah menjadi hilang *tanpa kirana* ditelan kepentingan politik jangka pendek. Tentu bukan tempatnya di sini, mempersoalkan siapa yang benar di antara kedua belah pihak yang berseteru, namun yang perlu dipertanyakan adalah mengapa setiap perbedaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan bangsa ini selalu berakhir dengan huru-hara yang melibatkan masyarakat dan massa ? mengapa nalar dan nilai kebersamaan kita tidak mampu menyelesaikan perbedaan dengan sebaik-baiknya ? Mengapa semuanya harus diakhiri dengan pertikaian, caci maki, permusuhan, bahkan pengrusakan ? mengapa?

Insiden di atas, hanya salah satu di antara sekian huru-hara yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan PILKADA. Entah berapa banyak kerugian materil dan nonmateril akibat ketidaksiapan kita menghadapi suatu proses demokrasi ini. Apalagi jika diingat bahwa dana yang dipergunakan untuk pelaksanaan PILKADA ini, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang nota benenya adalah milik rakyat yang seyogianya digunakan untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Demokrasi memang mahal. Namun tidak berarti gara-gara idealisme penegakkan cita-cita demokrasi, lantas rakyat yang dikorbankan. Mendingan kalau nantinya para pemimpin di daerah-daerah yang terpilih lewat PILKADA ini mampu melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya dengan baik, kalau tidak, cost untuk PILKADA ini tentu tidak seimbang dengan cita-cita yang diharapkan.

Sesungguhnya bangsa ini telah merasa lelah dengan terus menerus didera konflik akibat tidak arifnya pemimpin menyikapi kekalahan. Lihat saja bagaimana pendukung Zainuddin MZ yang menghalau mobil Menteri Dalam Negeri. Mereka memaksa sang menteri untuk melantik kepengurusan Partai Bintang Reformasi di bawah pimpinan sang Kiyai itu. Belum lagi konflik gerakan pembaharuan PDI Perjuangan dengan kubu Megawati. Konflik di PKB pun semakin memanas dengan terpecahnya partai tersebut menjadi dua kubu. kubu Muhaiman Iskandar dan Kubu Alwi shihab. Semua konflik yang bernuansa politik itu semuanya melibatkan massa. Mengapa? pemimpin nya tidak arif.

Memang godaan kekuasaan begitu hebat. kekuasaan dapat mendatangkan jabatan dan jabatan bisa mendatangkan kekayaan. Itu sebabnya banyak di antara kita yang mengejar kekuasaan. Karena dalam kekuasaan itu, ada kekayaan. Entah apa yang akan terjadi jika kekuasaan tidak mendatangkan kekayaan. Sepertinya percaturan politik kita akan sepi pembeli. Dalam konteks ini, Nurcholis Majid pernah berujar bahwa sudah waktunya kita merasa terhormat menjadi oposisi. Menjadi oposisi berarti kita mulai mencoba membalikkan mainstream pemikiran dan opini kita selama ini yang merasa terhormat menjadi pejabat publik.

Itulah gambaran atau potret kelam demokrasi kita. Demokrasi yang tertatih-tatih dikarenakan proses transformasi yang kurang berjalan mulus. Suatu proses yang gamang penuh *trial dan error*. Pembelajaran dan pendidikan politik kita tidak matang dan terencana. Sumber daya manusia kita tidak mampu mentransformasi secara memadai konsep demokrasi untuk selanjutnya dimatangkan dan diaplikasikan dalam proses suksesi kepemimpinan nasional dan daerah.

Di samping itu, kendala lemahnya integritas moral turut pula mendorong kehancuran sistem demokrasi kita. lihat saja bagaimana lembaga terhormat yang menajadi rumah dan dapurnya proses pemilihan kepemimpinan nasional pada pemilu 2004 kemarin, amblas secara memalukan dikarenakan korupsi. ini adalah suatu tragedi kemanusiaan yang sangat ironi. Mengapa bisa terjadi demikian? lagi-lagi SDM kita yang rapuh. Rapih dari semangat perjuangan dan idealisme. Idealisme berbangsa kita telah mati.

Membangun Demokrasi yang Sehat

melihat realitas sosio-politik seperti ini, apa yang mesti kita kedepankan sebagai solusi dini dan preventif untuk kemajuan demokrasi kita? Banyak hal yang harus dikerjakan. Satu yang terpenting adalah ubah orientasi kekuasaan para pemimpin publik kita dari orientasi kepentingan politik sesaat menjadi orientasi kepentingan nasional yang lebih bernilai. Jika ini menjadi pijakan para pemimpin kita baik di daerah atau pun di pusat, niscaya proses transformasi demokrasi kita akan mulus. Jika tidak, maka malapetaka yang diakibatkan rendahnya kesadran politik pemimpin ini akan melahirkan bencana demi bencana politik yang lebih menakutkan.

Penegakkan supremasi hukum, keadilan sosial, keadilan ekonomi, penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan budaya juga merupakan hal-hal yang harus menjadi pertimbangan kita semua ke depan. Bagaimana semua itu bisa menjadi pedoman dan perisai kita dalam melalui tahapan berdemokrasi yang sehat. Lihatlah bagaimana cara-cara pemimpin bangsa kita dahulu dalam berdemokrasi. Contohlah mereka. Contohlah Pak Syafruddin Prawiranegara yang rela menyerahkan kekuasaannya kepada Bung Karno dengan ikhlas dan tulus tanpa menyimpan dendam dan menyisakkan masalah untuk bangsa ini.

Apalagi jika kita merenungkan cost yang harus dikeluarkan untuk PILKADA ini. Uang rakyat ini seyogianya diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Tentu dzalim sekali, jika dana yang sangat besar ini dihabur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak melahirkan kemajuan di kemudian hari. Demokrasi memang mahal. Barang impor ini selalu mendatangkan keruwetan nasional. Tetapi mengapa kita masih mau juga menggunakannya?

Semoga kita semua dapat melalui tahapan proses transformasi berdemokrasi ini dengan aman, selamat dan melahirkan sesuatu yang berarti bagi kemajuan bangsa ini. Wallahu 'alam

CITA-CITA PROKLAMASI DAN BIAS KEMERDEKAAN

Mukaddimah

Pekik merdeka atau mati, tak lagi terdengar menggema di bumi tercinta Indonesia ini. Desingan mesiu dan kepulan asap tebal tak lagi menghiasi sudut-sudut kota dan desa yang pernah menjadi tempat hidup mati para pejuang kemerdekaan saat bergolaknya revolusi fisik demi meraih satu cita-cita luhur dan mulia yang tiada lain adalah pembebasan dan kemerdekaan.

Dan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan yang bebas, merdeka, adil, dan makmur, maka alhamdulillah cita-cita kemerdekaan itu kini sudah terwujud. Enam puluh tahun sudah Indonesia merdeka. Merdeka dari segala bentuk penindasan, kekerasan, kerja paksa, cultuur stelsel, dan semua hal yang pernah dirasakan oleh bangsa kita ketika berada dalam belenggu kolonialisme dan imperilisme Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang.

Sungguh pantas jika pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-60 ini, kita semua sebagai bangsa dan negara berucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa sampai detik ini, Indonesia sebagai suatu bangsa dan negara masih eksis berperan dalam percaturan dunia internasional melalui hasil-hasil pembangunan yang tiada lain adalah sebagai hasil atau buah dari kemerdekaan itu. Rasa syukur itu bisa diwujudkan dalam bentuk membangun komitmen untuk sungguh-sungguh melaksanakan cita-cita proklamasi 1945. Cita-cita proklamasi itu antara lain adalah terwujudnya keadilan sosial, ketertiban umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan pada lima sila Pancasila.

Cita-Cita Proklamasi 1945

Baiklah, marilah kita menakar dan mencoba melakukan evaluasi menyeluruh tentang kehidupan kebangsaan kita selama rentang enam dekade terakhir ini. Apakah cita-cita proklamasi 1945 itu telah benar-benar terwujud sepenuhnya dalam artian yang sebenarnya, ataukah cita-cita itu hanya baru tercapai setengahnya, seperempatnya, atau hanya baru sebatas cita-cita yang tak pernah terwujud alias baru sebatas retorika saja?

Poin pertama dari cita-cita proklamasi adalah mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial adalah nilai yang bertujuan mewujudkan pemerataan di tengah-tengah masyarakat dalam meraih kesempatan mendapatkan pekerjaan, penghasilan, kehidupan yang layak sehingga masyarakat dapat meraih sebagian besar dari kebutuhan dasarnya yang berupa pangan, sandang dan papan. Jika masyarakat suatu bangsa telah mendapatkan sebagian besar kebutuhan hidupnya yang paling mendasar, maka masyarakat tersebut dapat dinilai sebagai masyarakat yang sejahtera. Kemudian setelah masyarakat tersebut telah menjadi suatu masyarakat yang sejahtera dan bagaimana kesejahteraan tersebut benar-benar telah merata, maka inilah yang disebut dengan keadilan sosial.

Poin kedua adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah suatu cita-cita dan nilai yang ditempuh melalui pendidikan. Pendidikan yang dimaksud bukan hanya pendidikan formal, akan tetapi segala bentuk usaha yang bertujuan membangun olah pikir, pencerahan, pengetahuan, penelitian, dan integritas moral masyarakat. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang akan terasa hasilnya setelah satu atau dua generasi.

Ketahanan bangsa ini akan senantiasa terjaga jika masyarakat yang mendiaminya telah memiliki sumber daya dan daya saing yang bisa diandalkan.

Poin ketiga adalah menciptakan ketertiban umum dan perdamaian dunia. Cita-cita ini mengisyaratkan kepada kita semua akan pentingnya keikutsertaan kita sebagai suatu bangsa dan negara yang berdaulat untuk memelihara ketertiban dan perdamaian dunia. Dunia yang damai adalah dunia yang terbebas dari kekerasan satu negara terhadap negara yang lain, membuang jauh-jauh kolonialisme dan imperialisme dalam segala bentuk dan jenisnya, tetap terpeliharanya konservasi alam dari ancaman kerusakan lingkungan, dan menghindari penggunaan teknologi nuklir dalam segala bentuknya.

Bias Kemerdekaan

Setelah kita merenungi tentang cita-cita proklamasi, apakah bangsa dan negara ini telah benar-benar memasuki dan berada dalam cita-cita itu? Untuk menjawabnya, setiap orang tentu akan berbeda-beda dalam memberikan penilaiannya. Namun, kalau kita mau jujur dan objektif dalam melihat realitas sosial, politik, ekonomi, dan ketahanan nasional yang terjadi saat ini, maka kita harus mengatakan bahwa cita-cita proklamasi itu masih jauh dari harapan.

Cita-cita itu sangat bias. Bias karena cita-cita keadilan sosial hanya milik sebagian kecil dari bangsa ini. Ketimpangan sosial dan kesenjangan sosial begitu terlihat menganga dalam struktur sosial kehidupan kita. Masih ada 36 juta rakyat Indonesia yang berada dalam garis atau di bawah garis kemiskinan, masih ada 9 juta penduduk yang tidak memiliki pekerjaan alias pengangguran terbuka. Belum lagi kasus-kasus kekurangan gizi, gizi buruk, pelayanan kesehatan yang diskriminatif, dan seabreg problem sosial lainnya.

Melihat realitas sosial seperti di atas, sudah pada saatnya para pengambil kebijakan di negeri ini untuk merumuskan penanganan yang integral sebagai usaha sistematis dalam melakukan penyelamatan bangsa dan masyarakat ini dari kondisi sosial yang sangat timpang ini. Masyarakat kita saat ini butuh suatu gerakan massal yang bertujuan untuk terwujudnya pemerataan pembangunan dan keadilan sosial. Segera diambil usaha konkrit untuk mengurangi angka kemiskinan terbuka. Ini penting dikemukakan sebagai antisipasi dari munculnya frustrasi sosial yang akan menjadi bom waktu. Sebab kesempitan ekonomi jika telah sampai pada taraf akut akan memunculkan revolusi sosial.

Bias kemerdekaan juga dapat dilihat dari kualitas pendidikan kita. Usaha-usaha mencerdaskan kehidupan bangsa yang ditempuh melalui penyelenggaraan pendidikan selama ini, tampaknya belum menggembirakan. Problem pendidikan nasional ini masih terkait dengan masalah-masalah klasik, mulai dari gaji guru yang kecil, kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan pasar dan industri, bangunan dan fasilitas fisik yang tidak memadai, sangat tingginya tingkat putus sekolah, pungli yang merajalela ketika masuk tahun ajaran/akademik baru, dan persoalan-persoalan klasik lainnya yang tak kunjung bisa selesai. Belum lagi masalah kontemporer lainnya, seperti munculnya komersialisasi pendidikan, sekolah unggulan, subsidi yang tidak merata, dan masalah-masalah kontemporer lainnya. Semua itu semakin menyeret wajah pendidikan Indonesia menjadi semakin terpuruk.

Menyangkut peran bangsa kita dalam percaturan Internasional, catatan sejarah kita memang sempat menorehkan sejarah gemilang. Namun, akhir-akhir ini diplomasi dan politik luar negeri kita semakin terpuruk yang ditandai dengan lepasnya Timor-Timur dari pangkuan NKRI. Stabilitas teritorial kita pun beberapa kali diganggu oleh negara tetangga. Lihat saja bagaimana pulau Sipadan dan Ligitan yang baru-baru ini lepas, belum lagi Blok Ambalat, Papua, dan Aceh.

Semua itu semakin memperkuat biasnya kemerdekaan. Cita-cita proklamasi 1945 masih jauh dari kenyataan. Kemerdekaan sekarang ini masih milik sebagian masyarakat kita dan belum menjadi milik seluruh masyarakat dan bangsa kita. Oleh karena itu, perlu segera dicarikan solusi kongkrit untuk mencoba mewujudkan cita-cita proklamasi Indonesia. Sebab kalau tidak, maka tidak mustahil bangsa besar yang bernama Indonesia akan hancur tinggal sejarah, jika kesenjangan sosial yang menganga lebar terus dipelihara, , pemerataan kesempatan mengenyam pendidikan, tidak dilaksanakan, dan diplomasi yang selama ini, tidak ditingkatkan. Dirgahayu Republik Indonesia ke 60!

MIRZA GHULAM AHMAD, PELESTARI AL-QUR'AN?
(Tanggapan atas Hasil Wawancara Satelitnews dengan Akhmad Dahlan)

Membaca hasil wawancara antara wartawan harian ini dengan bapak Akhmad Dahlan, sesepuh Ahmadiyah Gondrong Cipondoh, Senin, 15 Agustus 2005, telah mengusik saya untuk memberikan tanggapan sebagai hak jawab warga sekaligus pembaca atas beberapa hal atau pokok pikiran dari bapak AD yang harus didiskusikan dan bahkan diluruskan.

Jujur saja, wawancara itu terkesan parsial dan tidak mengungkapkan hal yang paling mendasar dari kekeliruan-kekeliruan paham Ahmadiyah yang menjadi dasar penolakan mayoritas umat Islam di Indonesia, seperti benarkah Jemaat Ahmadiyah tidak menggunakan "Al-Qur'an" versi mereka sebagai pedoman hidup? Kalau tidak buat apa mereka buat-buat kitab suci kalau tidak digunakan? Bagaimana ikrar Syahadatain mereka, apakah sama dengan ikrar syahadatain yang selama ini kita yakini? Kalau Mirza Ghulam Ahmad itu nabi, kapan ia menerima wahyu? Karena setiap nabi pasti menerima wahyu, dan masih banyak lagi hal lainnya.

Pertanyaan-pertanyaan ini perlu disampaikan supaya pembaca menjadi paham secara menyeluruh kekeliruan-kekeliruan Ahmadiyah. Jika hasil wawancaranya tidak menyentuh secara integral keseluruhan masalahnya, maka yang terjadi adalah distorsi informasi yang dapat menyebabkan terjadinya distorsi kesimpulan. Oleh sebab itu, melalui tulisan ini, diharapkan akan muncul semacam informasi tambahan yang dengan tambahan ini, bapak Akhmad Dahlan dapat memberikan jawaban balik.

Ketika ditanya tentang awal berdirinya Ahmadiyah, bapak Akhmad menjawab begini, "Ahmadiyah meyakinkan janji Nabi Muhammad SAW akan kedatangan Isa Al-Masih yang kedua kalinya, dan Mahdi yang dijanjikan itu sudah datang. Dan bahkan Jemaat Ahmadiyah ini merupakan pendirian beliau". Berdasarkan beberapa hadits, Isa Al-Masih yang akan turun atau diturunkan kembali datang dengan misi menghancurkan segala bentuk penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh umat manusia baik dalam tataran tauhid (akidah) atau akhlak. Dan kedatangan Al-Masih tersebut nanti di akhir zaman menjelang datangnya hari kiamat. Dan jika Mirza Ghulam Ahmad diyakini sebagai Al-masih atau Al-Mahdi, sejarah mana yang menerangkan bahwa ia melakukan pembersihan akidah (tauhid) dari kemusyrikan, menghancurkan berhala, dan menghancurkan bangunan-bangunan lain yang dijadikan sebagai tempat terjadinya semua penyimpangan tauhid. Jadi bagaimana kami dapat menerima atas kemahdian Mirza, sebab apa yang dilakukan oleh Mirza Ghulam Ahmad tidak sesuai dengan hadits. Al-Hadits lah yang menjadi pedoman kami, setelah Al-Qur'an. Yang justru dilakukan oleh Mirza Ghulam Ahmad adalah pengakuan menerima wahyu, membuat dan menyusun Al-Qur'an versi mereka, dan bahkan membuat firqoh baru yang memecah keyakinan umat.

Kemudian ketika ditanya apakah Mirza itu nabi anda, bapak Akhmad Dahlan menjawab "kami meyakini Nabi Muhammad SAW itu utusan yang terakhir dan Al-Qur'an sebagai peninggalannya (syariat). Muhammad itu berpangkat "khatamunnabiyyin" (nabi terakhir) tiada lagi nabi seperti beliau. (garis miring dan underline dari penulis). Tapi nabi yang memperbaharui dan menjaga kelestarian Al-Qur'an musti ada dan keyakinan Ahmadiyah...". Kalau Jemaat meyakini tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad dan Al-Qur'an adalah wahyu terakhir, maka persoalannya selesai sampai di sini. Tak ada yang perlu dipertanyakan dan diperdebatkan. Namun, bapak Akhmad menulis kata-kata tidak ada lagi nabi seperti beliau. Ini secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa ada nabi setelah kenabian Muhammad dengan tugas lain. Nah inilah yang tidak bisa kami terima. Kalau nabi ya nabi dengan tugas menerima wahyu, kalau ada seseorang yang bertugas melakukan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan akidah umat, bukan lah nabi, tapi pembaharu (*mujaddid*). Kalau keberadaan

mujaddid, itu mutlak kebenarannya. Kami juga mengakui akan adanya mujaddid setiap seratus tahun sekali. Jadi kalau mau juga, Mirza itu seorang mujaddid, bukan nabi. Tapi, untuk menjadi seorang mujaddid, butuh kriteria-kriteria khusus, tidak sembarangan. Ia mestilah memiliki integritas keilmuan yang mendunia, memiliki reputasi dan sumbangsih yang diakui dunia Islam, memiliki integritas moral yang tak diragukan, dan syarat-syarat lainnya. Nah pastaskah seorang Mirza Ghulam Ahmad itu dikategorikan sebagai seorang mujaddid ? dunia Islam lah yang menilainya.

Kemudian, ketika dimintai penjelasan lebih lanjut, bapak Akhmad menjawab, "seperti hazarat Mirza Ghulam Ahmad yang bertugas menghidupkan agama dan menegakkan syariat yang sudah ada (Islam dan Al-Qur'an) Mirza Ghulam Ahmad itu seperti nabi bayangan..." Perlu diketahui bahwa tugas-tugas seperti di atas adalah tugas setiap muslim. Setiap muslim wajib menegakkan syariat dan menghidupkan agama yang dilandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian, dalam Islam tidak dikenal nabi bayangan, malaikat bayangan, Rasul bayangan, dan bayangan-bayangan yang lain. Nabi adalah nabi yang bertugas menerima wahyu untuk dirinya dan tidak ada kewajiban untuk menyebarkannya di tengah-tengah masyarakat. Rasul adalah Rasul yang bertugas menerima wahyu sekaligus memiliki kewajiban menyebarkan risalah kepada masyarakat. Itulah penjelasannya. Sedangkan khalifah (pengganti) adalah pemimpin negara atau pemerintahan yang menggantikan posisi Nabi Muhammad SAW sebagai seorang kepala negara dan tidak menggantikan posisi beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul, seperti apa yang terjadi pada khalifah yang empat (khalifah rasyidin), yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali.

Tentang Tadzkirah, hati nurani Jemaat Ahmadiyah sendirilah yang mengetahui bagaimana perlakuan mereka terhadap Tadzkirah ini. Namun, kalau memang tidak digunakan dan tidak berfungsi apa-apa, kenapa harus dicetak dan disebarluaskan ke tengah-tengah jamaah? Bukankah sudah ada Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi pedoman permanen ummat Islam. Untuk itu, saya menyeru kepada segenap Jemaat Ahmadiyah untuk melakukan taubat massal, kalau memang mereka masih mengakui dirinya sebagai muslim yang berTuhankan Allah SWT dan bernabikan Muhammad SAW. Selesai sudah masalahnya dan tidak usah membawa-bawa nama Mirza Ghulam Ahmad dalam tataran keimanan (akidah) Islam. Ini semua kontra produktif.

Oleh sebab itu, pendirian bapak Akhmad yang menganggap Mirza sebagai pelestari Al-Qur'an tidak lah tepat. Sebagai mahdi pun juga tidak tepat. Yang malah muncul sekarang adalah keresahan, pendangkalan, dan perpecahan yang diakibatkan oleh kemunculan Mirza yang ngaku-ngaku sebagai seorang nabi. Ini harus diakhiri!

Yang terakhir, argumentasi apa pun yang mencoba menyeret-nyeret agar muncul dan tumbuh suatu pemahaman yang mengarah pada keyakinan bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai seorang nabi, adalah sebuah usaha kesiasiaan belaka, dan kami anggap sebagai suatu usaha pendangkalan dan penghancuran akidah ummat Islam yang harus segera dihentikan.

Wallahu 'alam

JANGAN BERHENTI BERDO'A
Oleh : Abdullah Jarir

Setiap do'a pasti terkabul. Maka teruslah berdo'a kepada Allah 'azza wa jalla dan mintalah apa yang kita butuhkan, niscaya Allah akan mengabulkannya. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Mukmin ayat 60 yang artinya : Dan Tuhanmu berfirman : "Berdo'alah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina. Dalam ayat lain Allah menegaskan : Dan apabila hambaku bertanya tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdo'a apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran (Al-Baqarah:186).

Dua ayat di atas dengan tegas menyuruh kita untuk senantiasa memanjatkan do'a untuk semua kebutuhan kita di dunia dan terlebih-lebih lagi untuk kehidupan kita di akhirat. Hanya persoalannya tidak semua do'a yang disampaikan itu langsung dikabulkan Allah. Memang ada yang langsung terkabul, ada yang dilambatkan, ada yang diundur, dan ada pula yang diganti dengan sesuatu yang lebih besar pahalanya.

Hadits lain yang menjadikan kita optimis bahwa setiap do'a itu pasti terkabul adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah yang intinya menjelaskan : do'a setiap hamba itu terkabul selama do'anya itu tidak mengandung dosa, tidak memutuskan silaturahmi, dan tidak tergesa-gesa. Hadits yang senada juga datang dari Anas Bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah.

Kemudian, apa yang sebaiknya kita sampaikan dalam do'a kita? Tentang hal ini, kita dapat mencontoh do'a-do'a yang Rasulullah sampaikan. Secara garis besar, do'a Rasul itu terbagi dua, yaitu do'a yang menyangkut permintaan (permohonan) dan do'a yang berupa perlindungan. Do'a-do'a yang berhubungan dengan permohonan di antaranya , do'a supaya diberikan petunjuk, ketakwaan, menjadi pemaaf, dikayakan (kekayaan hati), dan ditetapkan hati dalam beragama (HR Ibnu Majah). Adapun do'a yang menyangkut perlindungan di antaranya, do'a agar terhindar dari siksa api neraka, siksa kubur, fitnah (ujian) hidup dan mati, terhindar dari kejelekan akibat perbuatan baik yang telah dan yang akan diperbuat. (HR Ibnu Majah).

Dengan demikian, melalui do'a kita dapat dua keuntungan sekaligus, yaitu : pertama, keuntungan akan terhindar dari murka Allah SWT., karena orang yang meninggalkan do'a adalah orang yang sombong dan dimurkai. Kedua, keuntungan akan pasti dikabulkannya setiap do'a yang kita sampaikan. Oleh karena itu, merugilah orang yang tidak berdo'a dan beruntunglah orang yang senantiasa berdo'a. Jadi, jangan berhenti berdo'a !

BANTEN DAN EKSISTENSI BANGSA : HARAPAN UNTUK CALON GUBERNUR BANTEN TERPILIH

Mukaddimah

Seperti perkiraan para pengamat sebelumnya, Pasangan Atut-Masduki akhirnya tampil sebagai pemenang dalam Pilkada Banten November 2006 tempo hari. Kemenangan pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Atut-Masduki ini sangat lumrah karena mereka didukung oleh enam partai yang sudah mapan, yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, Partai Bintang Reformasi, Partai Damai Sejahtera, dan Partai Karya Peduli Bangsa. Meskipun kemenangan ini sempat diwarnai protes kecil dari pendukung Partai Keadilan Sejahtera yang megusung Zul-Marissa, namun sebagai suatu proses demokrasi, pelaksanaan Pilkada Banten tersebut patut mendapat apresiasi yang proporsional dari kalangan masyarakat Banten. Artinya siapapun yang menang harus didukung selama proses demokrasi dan aturan mainnya ditaati.

Sebagai kelanjutan dari proses demokrasi ini dan sebagai tujuan sesungguhnya dari semua proses demokrasi yang telah dilaksanakan itu adalah bagaimana membangun Banten ke depan agar tercipta masyarakat Banten yang adil, makmur dan sejahtera yang berada dalam ridho Allah SWT., sesuai karakter masyarakat Banten yang religius. Inilah barangkali tugas berat yang harus diemban oleh calon Gubernur dan calon wakil gubernur Banten terpilih selama lima tahun ke depan. Lewat tulisan ini, akan coba dipaparkan beberapa pokok pikiran yang mudah-mudahan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi yang bersangkutan.

What Is To Be Done ?

Agar janji yang disampaikan oleh para kandidat Gubernur pada kampanye tempo hari tidak berhenti sebatas retorika saja dan supaya menjaga integritas, maka alangkah baiknya jika janji-janji pada kampanye tersebut diaktualisasikan dalam masa kepemimpinan lima tahun ke depan. Perlu disampaikan juga bahwa masyarakat akan mencatat dan memperhatikan sejauhmana janji-janji itu teraktualisasikan dan kemudian terasa langsung dampaknya bagi kehidupan ekonomi mereka. Sebab jika janji-janji itu terhenti pada tataran retorika saja, jangan harap partisipasi masyarakat dalam Pilkada mendatang akan membaik atau meningkat. Ingat bahwa partisipasi pemilih pada pilkada kemarin relatif kurang representatif. Hal ini disebabkan masyarakat sudah sangat jenuh dengan semua janji orang-orang yang ingin terpilih dalam setiap momen Pemilu, Pilkada, dan momen-momen lain yang seperti biasa berhenti sebatas retorika. Maka sudahi semua kebohongan itu dengan bukti demi kontinuitas eksistensi kebangsaan kita. Kita sudah sangat tertinggal dengan negara-negara lain.

Berbicara eksistensi kebangsaan, selayaknya calon Gubernur Banten terpilih membuka mata bahwa alangkah rentannya eksistensi kebangsaan kita dalam memasuki beberapa dekade ke depan. Jika muncul pertanyaan apa hubungannya tugas kepala daerah dengan eksistensi bangsa ? Jawabannya adalah eksistensi sebuah bangsa akan terkait dengan eksistensi sebuah daerah yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan negara yang daerah itu berada. Artinya jika kondisi daerah pada suatu negara itu maju, maka dengan sendirinya eksistensi negara itu kuat dan kokoh. Sebaliknya jika keadaan suatu daerah itu rapuh sudah dapat dipastikan bahwa eksistensi negara itu akan lemah dan rentan dengan segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar.

Ancaman sesungguhnya adalah berasal dari dalam negeri terutama dari rasa frustrasi masyarakat yang berkepanjangan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari kondisi kemiskinan struktural yang diderita masyarakat. Kemiskinan struktural ini adalah bom waktu yang siap meledak kapan saja menunggu pemicu. Kondisi ini sangat jarang diantisipasi oleh

para pejabat publik kita. Biasanya kalau sudah terjadi kerusuhan sosial yang bersifat massal barulah kita semua tersadar. Agar kerusuhan itu tidak sampai terjadi hendaknya kita semua terutama pejabat publik memiliki kemampuan antisipasi. Kemampuan yang dimaksud adalah hendaknya para pejabat kita memahami denyut nadi masyarakat miskin yang ada di daerah-daerah dan kemudian mencari akar masalah yang diharapkan dapat menahan laju emosi masyarakat.

Denyut nadi masyarakat miskin Banten yang berada di beberapa daerah di kabupaten Tangerang atau sepanjang pantai selatan Banten dapatlah menjadi perhatian pemerintah daerah yang sejauh ini cukup rentan memunculkan konflik. Jalan-jalan yang rusak dan parah, tingkat kesehatan masyarakat yang rendah, sistem sanitasi dan air bersih yang jauh dari layak, tingkat pendidikan yang tertinggal dengan daerah lain yang ada di Banten, semua ini akan sangat mudah memicu konflik dan mengusik rasa ketidakadilan masyarakat yang pada saatnya akan muncul sebagai bola panas yang berupa aksi anarkis masyarakat. Tentu hal ini tidak kita inginkan. Oleh karena itu, tangkap dan cermati akar masalah di daerah-daerah terbelakang ini, kemudian buat skala prioritas bagaimana daerah-daerah sepanjang pantai utara Banten ini terselamatkan dan menjadi bagian yang penting dari Banten sebagai suatu daerah provinsi.

Problem kesenjangan

Upaya kongkrit yang harus segera dilakukan adalah meminimalisir kesenjangan sosial yang sangat menganga antara daerah-daerah kaya seperti Tangerang Kota, Ciputat, Serpong dan daerah kaya lainnya dengan daerah-daerah miskin seperti Mauk, Teluk Naga, Rajeg, dan daerah-daerah tertinggal lainnya. Langkah yang dapat ditempuh di antaranya dengan membuat perimbangan keuangan atau anggaran antara kedua wilayah tersebut dengan diberikannya alokasi dana yang lebih besar kepada wilayah Banten yang tertinggal. Dengan demikian alokasi untuk daerah Banten yang relatif tertinggal lebih besar dibandingkan dengan daerah Banten yang relatif lebih maju.

Upaya lain yang dapat dilakukan untuk menguatkan fundamental ekonomi di daerah-daerah tertinggal di antaranya dengan membangun segera fasilitas dan sarana pendidikan yang memadai yang didukung dengan infrastruktur berupa jalan-jalan yang memadai, sarana kesehatan yang mendesak, dan tentu saja lapangan kerja untuk masyarakat sekitarnya. Semua ini harus segera diagendakan sebagai suatu aksi kongkrit Calon Gubernur terpilih lima tahun ke depan. Sebab kalau kesenjangan antara utara-selatan tidak segera ditanggulangi, maka yang akan terjadi adalah kerawanan sosial, artinya akan terjadi penumpukan pencari kerja dari selatan ke utara Banten. Padahal idealnya hendaknya dilakukan optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat di selatan Banten menciptakan sebanyak-banyak lapangan kerja sehingga masyarakat di selatan Banten itu tidak merasa menjadi masyarakat kelas dua di daerahnya sendiri.

Kontek Eksistensi Bangsa

Agenda besar di bidang ekonomi yang harus diemban oleh calon gubernur Banten dalam masa lima tahun ke depan adalah bagaimana membangun paradigma ekonomi Banten yang berkeadilan, pro rakyat banyak yang senantiasa menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan segelintir konglomerat. Paradigma ini bukan anti kapitalisme ekstrim yang membabi buta akan tetapi suatu pemikiran matang demi terciptanya Masyarakat Banten yang adil, makmur dan bermartabat yang akan sangat membantu masa depan dan eksistensi bangsa ke depan. Betapa tidak, problem kemiskinan inilah yang banyak melanda di setiap provinsi di Indonesia ini. Sedangkan problem kemiskinan inilah yang banyak memicu terjadinya kerusuhan sosial. Oleh karena itu, bila Banten kuat secara ekonomi, maka ini adalah investasi penting bagi tegaknya eksistensi bangsa ke depan.

Hal krusial lainnya yang harus segera ditangani secara serius adalah penyebaran transaksi narkoba yang sejauh ini telah menampakkan gejala-gejala yang terus meningkat baik

kualitas maupun kuantitasnya. Dalam beberapa kasus yang berhasil diungkap pihak berwajib beberapa daerah di Banten seringkali dijadikan tempat pembuatan narkoba jenis ekstasi. Belum lagi keberadaan Bandara Udara Internasional Soekarno Hatta sering kali menjadi pintu masuk jaringan narkoba internasional. Keseriusan pemerintah termasuk di dalamnya pemerintah Banten dalam memerangi peredaran dan transaksi narkoba benar-benar diuji nyalinya dalam waktu-waktu ke depan ini. Bagaimana tidak, bahaya yang diakibatkan jika peredaran narkoba ini tidak ditangani dengan sangat-sangat serius maka yang akan terjadi adalah kehancuran bangsa di masa depan. Kita akan kehilangan beberapa generasi akibat narkoba ini. Sekali lagi eksistensi bangsa akan sangat ditentukan oleh kesungguhan semua pihak memerangi barang haram ini.

Semangat pengabdian aparatur pemerintah adalah salah satu pilar penting dalam membangun masyarakat dan bangsa. Mengapa semangat pengabdian ? Karena mentalitas pegawai negeri sebagai aparatur pemerintah dan abdi negara seringkali kontra produktif dengan semangat kemajuan. Mentalitas dan etos kerja yang rendah dari aparatur kita akan sangat mengganggu kemajuan bangsa ini. Keberadaan pegawai pemerintah yang gemuk dan tidak produktif tentu saja adalah pemborosan uang negara yang mestinya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya. Oleh karena itu, ke depan pegawai pemerintah harus produktif dengan terus meningkatkan mentalitas dan etos kerjanya demi eksistensi bangsa. Ingat kita telah kehilangan banyak waktu dan tertinggal jauh dari negara-negara lain. Jika keberadaan pegawai pemerintah tidak diperbaiki, maka yang akan terjadi adalah kehancuran bangsa.

Inilah sebagian pokok-pokok pikiran yang mudah-mudahan dapat menjadi bahan renungan dan pertimbangan calon gubernur Banten terpilih. *Wa Allahu 'Alam bi al Showwab*

ISLAM DAN ETOS KERJA

Adalah sebuah kenyataan bahwa masyarakat barat terutama eropa saat ini tengah berada di puncak peradaban. Lihat saja bagaimana kemajuan dan pencapaian ilmu penegetahuan dan teknologi terus mengalir deras sejak abad delapan belas masehi yang dipicu oleh penemuan mesin uap oleh James Watt. Setelah penemuan ini, penemuan-penemuan yang lain terus menerus bermunculan dari benua ini. Riset demi riset seolah tak hanti-hentinya dilakukan oleh negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika. Dan hasilnya seperti yang dapat kita lihat dan rasakan bahwa dengan teknologi tinggi, segalanya menjadi cepat, mudah dan kita semua termanjakan.

Menurut Max Weber, salah satu alasan kenapa masyarakat barat yang mayoritas beragama kristen itu (terutama Protestan), begitu maju meninggalkan masyarakat lain yang beragama nonkristen ? Jawabannya menurut Weber adalah karena dasar teologi yang dianut oleh barat adalah teologi yang mengajarkan agar pemeluknya meniatkan segala bentuk aktifitasnya atas dasar ibadah kepada Tuhan. Mereka berasaha kerja keras dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan apapun pekerjaannya tanpa pamrih. Mereka bekerja bukan semata-mata tuntutan pekerjaan atau gaji besar, akan tetapi betul-betul "ikhlas" karena Tuhannya.

Salah satu doktrin ajaran kristen Protestan adalah orang yang miskin akan masuk neraka dan di neraka akan disiksa. Sedangkan orang kaya akan masuk surga. Atas dasar doktrin teologi ini, maka orang-orang atau pemeluk kristen protestan berusaha sungguh-sungguh dan "ikhlas" tanpa pamrih dalam melakukan apapun pekerjaan yang mereka lakukan. Dorongan dalam meraih kemajuan dan kekayaan di dunia inilah yang membuat mereka menjadi pekerja keras, ulet, rajin, dan "ikhlas". Meskipun pada perkembangan selanjutnya, Masyarakat eropa dan Amerika telah mengalami pergeseran nilai, bahkan penistaan nilai terhadap nilai-nilai agamanya sendiri dengan cara meninggalkan nilai-nilai itu.

Sebagai bahan perbandingan, Jepang misalnya, negara dan bangsa ini porak poranda akibat perang dunia ke dua. Tapi dalam beberapa dekade saja, negara mata hari terbit ini tampil sebagai negara termaju di dunia dengan teknologi otomotif dan elektroniknya. Mengapa bisa demikian? Salah satu alasannya adalah doktrin teologi yang dianut masyarakat jepang yang mengajarkan kepada penganutnya untuk selalu menanamkan niat ibadah dalam melakukan semua aktifitasnya. Sehingga tidak heran kalau Jepang sangat bersemangat, ulet, rajin, dan tak mudah menyerah.

Barat sekarang ini, telah gagal mencari solusi dari kekeringan moral mereka. Nilai-nilai ontologis barat sekarang ini hanya mampu menangkap fenomena-fenomena keilmuan tanpa mampu mencari solusi dari segala problem kehancuran moral pemeluknya yang telah terlalu jauh dari aspek transendennya. Sehingga yang terjadi sekarang adalah kemajuan yang lepas dari nilai-nilai transenden kepada Tuhan. Hal ini terjadi karena telah adanya desakralisasi nilai-nilai hidup yang begitu jauh dan diganti dengan nilai-nilai sekularisme. Dalam kondisi seperti ini yang terjadi adalah pemujaan terhadap materi, nalar, dan kebebasan tanpa batas. Ini harga mahal yang harus dibayar jika suatu nilai-nilai hidup sudah terlepas dari nilai-nilai transenden.

Etos Kerja dalam Islam

Islam sebagai sistem nilai bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sangat menekankan umatnya agar senantiasa giat bekerja, bersemangat, ulet dan sangat mencela sifat malas dan

berpangku tangan. Dalam sebuah hadits Nabi bersabda yang artinya " apabila kalian telah selesai melaksanakan sholat subuh, maka janganlah kalian tidur supaya dapat mencari rijki". Hadits dengan makna yang sama banyak tersebar yang pada intinya mengajak dan mendorong umat Islam untuk bekerja keras demi mencapai kemajuan. Dalam sebuah riwayat pernah diceritakan bahwa khalifah Ali Bin Abi Thalib pernah menegur dan mengusir salah seorang pemuda yang pekerjaannya hanya duduk berdzikir sepanjang siang dan malam tanpa melakukan suatu usaha untuk mencari rijki. Riwayat ini jelas sekali menggambarkan betapa Islam sangat tidak setuju dengan suatu kebiasaan dan pemahaman sebagian umat Islam yang menganggap tidak penting pencarian rijki.

Kalau agama-agama lain, seperti halnya Kristen Protestan dan ajaran konghucu Jepang mengajarkan umatnya untuk mendasarkan segala pekerjaan dan aktifitasnya atas niat ibadah, maka Islam adalah ajaran yang justru sangat-sangat tegas secara eksplisit menyebut ibadah sebagai dasar dalam melakukan semua perbuatannya (perbuatan baik). Bahkan dalam surat Al-Dzariyat ayat 56, Allah berfirman yang artinya : ..dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku". Dalam ayat ini dengan tegas Allah SWT menyatakan bahwa tujuan diciptakannya manusia tiada lain untuk beribadah kepadaNya.

Dalam khazanah keislaman, kita mengenal ibadah mahdoh dan ibadah goer mahdoh. Ibadah mahdoh artinya perbuatan ibadah yang segala sesuatunya telah diatur dengan jelas dan rinci dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti pelaksanaan shalat, haji, shaum dan lain-lain. Sedangkan ibadah goer mahdoh ialah perbuatan ibadah yang tidak secara rinci diatur tata cara, bentuk dan jenisnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi bahwa keduanya merupakan paket ibadah yang sama-sama memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah adalah suatu hal yang tidak bisa dibantah lagi.

Dalam konteks hubungan dengan pembagian ibadah tadi, maka etos kerja dapat dikategorikan sebagai perbuatan ibadah goer mahdoh. Artinya etos kerja adalah suatu nilai yang mendorong seseorang untuk bekerja keras dan rajin dalam melakukan pekerjaan untuk kemaslahatan dirinya sendiri dan sesama manusia. Jadi, perbuatan ibadah jenis ini, tidak ditujukan langsung kepada Allah, akan tetapi memiliki efek langsung kepada manusia yang pada esensinya dalam rangka mencari ridho Allah lewat perbuatan baik tadi.

Sungguh teramat luhur dan mulia ajaran Islam itu. Dikatakan mulia dan luhur karena di dalamnya mengandung aspek transenden dan empirik. Disebut transenden karena, Islam mengingatkan umatnya bahwa ketika melaksanakan suatu perbuatan haruslah dimulai dengan niat karena Allah SWT. Artinya, Apapun yang dilakukan seorang muslim haruslah ikhlas karena Allah dan bersih dari unsur-unsur kepentingan manusia yang sesaat. Aspek empirik artinya bahwa perbuatan ibadah tersebut seyogianya memiliki nilai manfaat bagi sesama manusia dan bukan semata-mata bekerja an sich. Di sinilah letak universalitas nilai-nilai Islam yang tidak dimiliki oleh barat sekarang ini.

Dalam konteks inilah, kita mesti banyak melakukan introspeksi diri, kenapa ajaran yang sangat luhur, mulia, dan agung ini tidak dapat mendorong kita untuk bangkit dari keterpurukan ini. apa yang salah dari ajaran islam sehingga umatnya "tertidur" sangat pulas di belantara kehidupan dan hiruk pikuknya peradaban ini. Siapa pun akan gagal memahami kenapa kemajuan yang telah diraih oleh umat lain tidak menjadikan kita terpacu dan kemudian lari mengejar ketertinggalan ini. Ataukah kita memang sama sekali tidak memiliki keinginan untuk maju dan berjuang supaya dapat kembali meraih kejayaan Islam seperti dulu? Peran ahli agama mutlak sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman yang benar tentang apa itu ibadah. Jangan sampai umat ini memiliki pemahaman yang salah tentang ibadah. Sebab ada

sementara masyarakat (umat Islam) yang menganggap ibadah itu dalam pengertian mahdoh saja. di luar itu, mereka menganggap bukanlah ibadah dan umat islam tidak diberikan kewajiban untuk melaksanakannya dengan baik, karena tidak ada pahalanya.

Dengan demikian, sikap dan keyakinan umat Islam jelas sekali bahwa kita harus tetap memegang nilai-nilai transenden yang dilandasi ajaran agama, dan secara konsisten pula melaksanakan kewajiban-kewajiban kita baik itu kewajiban beribadah kepada Allah yang mahdoh dan kewajiban kita kepada manusia (goer mahdoh) agar tercipta manusia yang memiliki keseimbangan spiritual.

Inilah barangkali sedikit renungan untuk sama-sama kita sikapi demi tercapainya pesan Al-Quram bahwa umat Islam adalah sebaik-baiknya ummat. Wallahu "alam

MENGAGAS PARTAI LOKAL

Mukaddimah

Ide partai lokal mengemuka di percaturan politik nasional berkat opsi yang diberikan pihak juru runding Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki Finlandia tempo hari. Dan ternyata ide ini benar-benar suatu sintesis dari kemelut berkepanjangan antara pemerintah Republik Indonesia dengan GAM. Ide ini harus benar-benar menyudahi semua konflik panjang dan berhasil membawa kedua belah pihak yang berseteru ke dalam suatu perdamaian yang hakiki dan tidak menimbulkan konflik-konflik berkelanjutan di kemudian hari.

Ide partai lokal ini seyogianya direspon dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah Republik Indonesia dengan terlebih dahulu melakukan analisis mendalam, cermat, akurat dan tentu saja menyeluruh. Ini penting untuk mengantisipasi dampak dari perberlakuan partai lokal ini, jika ide ini benar-benar dilaksanakan. Kemunculan ide partai lokal dari pihak GAM semoga benar-benar menyiratkan keinginan kuat untuk berdamai, dan bukan semata-mata jalan keluar sesaat untuk menghindari kebuntuan atau bukan semacam test case yang tidak lebih dari sekedar upaya politis dan diplomatis semata-mata.

Tapi, mungkinkah partai lokal yang semula hendak diterapkan di NAD kemudian coba digulirkan untuk daerah-daerah lainnya di luar NAD ? Ini pertanyaan yang cukup menarik untuk diwacanakan lebih dalam mengingat dalam iklim demokrasi saat ini, apa pun dapat terjadi asalkan mendapat dukungan rakyat yang tentu saja melalui prosedur hukum yang berlaku.

Plus Minus Partai Lokal

Terus terang ide partai lokal merupakan ide brilliant yang tidak terdikir sebelumnya. Ide ini memiliki dua mata pisau yang berpotensi menguntungkan sekaligus merugikan bagi kelangsungan masa depan nanggroe Aceh Darussalam khususnya dan Bangsa/Negara Indonesia pada umumnya. Ide ini harus dicermati dengan seksama dengan terlebih dahulu melakukan kajian mendalam dan menyeluruh. sebab jika salah dalam mengambil kebijakan dan keputusan, maka yang akan terjadi adalah kehancuran yang tidak saja melanda Aceh tapi juga dapat dipastikan akan merembet pada negara kesatuan republik Indonesia. Jadi akan terjadi sindrom kehancuran wilayah.

memang ada manfaat dari dimunculkannya ide partai lokal yang salah satu di antaranya adalah usaha untuk memecah kebekuan perundingan diplomasi antara kedua belah pihak. jadi ada semacam pencerahan atau colling down dari ketegangan diplomasi. Minimal ada secercah harapan kecil untuk membuka jalan damai yang menguntungkan kedua belah pihak. Meskipun perundingan ini belum menyentuh hal-hal yang paling fundamental yang justru hal ini sangat ditunggu-tunggu oleh banyak pihak.

Keuntungan lainnya adalah munculnya spirit optimisme dengan segala dampak positifnya jika kedua belah pihak benar-benar secara serius berkeinginan untuk terus menerus mau maju ke meja perundingan demi masa depan rakyat Aceh. Ini sangat diperlukan untuk membangun rasa optimisme rakyat Aceh yang sudah compang camping didera ketidakpastian hukum dan keamanan sekian lama, mulai dari pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM), pemberlakuan darurat militer, perpecahan dan konflik masyarakat akibat aksi GAM, belum lagi trauma

bencana alam tsunami, dan masalah-masalah kemanusiaan lainnya yang membuat mereka lelah dan cape berada dalam kubangan keputusan tak terbatas.

Semua persoalan di atas seharusnya menjadi spirit pihak-pihak yang bertikai di Aceh untuk sesegara mungkin mengakhiri semua kekerasan dan tragedi kemanusiaan yang muncul sebagai akibat langsung atau pun tidak langsung dari konflik ini. Sekarang ini Aceh tengah porak poranda secara fisik dan mental. negeri ini seolah tak henti-hentinya bergolak mulai peristiwa Darul Islam (DI), Tentara Islam Indonesia (TII), PRRI Permesta, DOM, dan lain sebagainya. Kondisi kekerasan ini jangan terus dibiarkan tanpa dicarikan solusi menyeluruh untuk menyelamatkan rakyat dari trauma psikologis yang menghantui mereka sejak lama. Dalam konteks inilah, kemunculan ide partai lokal ini setidaknya bisa memecah kebekuan perundingan untuk suatu ketika benar-benar terwujud suatu perdamaian.

Namun tentu saja ide partai lokal juga mengandung benih-benih radikalisme kepartaian. Artinya akan muncul rasa kebanggaan dan kecintaan yang berlebihan dari para pendiri partai lokal di Aceh. Ini wajar karena mereka merasa bahwa keberadaan partai mereka hanya eksis di daerahnya. Radikalisme kepartaian ini juga akan memicu ketegangan baru di daerah Aceh. Sebut saja partai A yang memiliki basis massa GAM akan dapat dipastikan potensial untuk berhadapan dengan partai B yang memiliki basis massa Non GAM. Kondisi ini sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, perlu ada kajian menyeluruh demi keselamatan dan masa depan perundingan RI-GAM ke depan.

Ide pendirian partai lokal juga bisa menjadi wadah para pejuang GAM untuk berlindung di balik keberadaan perjuangan mereka. Jadi, lewat kedok partai, mereka akan berusaha menjalankan program dan aksinya dengan leluasa. Keberadaan partai lokal hanya sebagai kendaraan politik saja untuk semata-mata membesarkan mereka. Ini juga perlu menjadi pertimbangan pemerintah pusat apakah keberadaan partai lokal itu memberikan arah menuju kemajuan perundingan atau justru sebaliknya mendatangkan kerugian.

Satu lagi yang harus diwaspadai bahwa bisa saja daerah-daerah lain akan menuntut hal yang sama kepada pemerintahan pusat. dengan alasan bahwa ada jaminan tidak akan ada disintegrasi bangsa nantinya, mereka akan menuntut didirikannya partai lokal. Ini yang akan menjadi kontra produktif. Jika di Aceh jadi berlaku partai lokal dan terjadi radikalisme kepartaian, maka kebijakan politik pemerintah tentang ini harus dibayar mahal dengan akan terjadinya tuntutan pemisahan wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika hal ini terjadi, siap-siap saja wilayah lain akan melakukan hal yang sama.

Khatimah

Oleh karena itu, hendaknya pemerintahan pusat jangan menjadikan usulan pendirian partai lokal semacam test case semata-mata, akan tetapi hendaknya mengkaji secara mendalam dan menyeluruh dampak-dampaknya bagi kelangsungan dan masa depan Aceh dan masa depan Indonesia. Sebab jika salah mengambil kebijakan dan keputusan politik, maka kehancuran dan disintegrasi bangsa tak mustahil akan terjadi. Jangan sampai sindrom Yugoslavia dan Uni Soviet terjadi di Negeri kita yang tercinta

DISORIENTASI TAJDID MUHAMMADIYAH :
DARI ORTODOKS KE HETORODOKS
(Beberapa Catatan jelang Milad Muhammadiyah ke- 97)

Mukaddimah

Memasuki bulan ini, perkumpulan Muhammadiyah akan melaksanakan miladnya yang ke 97. Sebagai organisasi masa yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, budaya, dan pembahaaruan Islam tentu telah banyak kontribusi yang telah diberikan kepada bangsa dan negara ini. Dan untuk Memotret sumbangsih apa yang telah diberikan Muhammadiyah dalam kurun waktu lebih kurang sepuluh dekade terakhir tidaklah cukup dibicarakan disini. Namun, sebagai ormas Islam yang pada awal berdirinya bertujuan untuk melakukan pembaharuan pemahaman umat Islam dalam beribadah (*tajdid al-Ummat*) inilah yang patut disoroti secara seksama; Apakah terjadi pergeseran yang mendasar dalam pengambilan kebijakan arah tajdidnya atau tidak. dari sinilah pembahasan ini akan mengalir, yaitu pembahasan tentang apakah telah terjadi perubahan orientasi tajdid Muhammadiyah dari tajdid yang fikih oriented ke tajdid sosial-pendidikan ?

Tajdid: dari Heterodox ke Ortodox

Sejarah berdirinya organisasi-organisasi keagamaan di Nusantara semisal Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis) tidak bisa lepas dari peran derasny arus pembaharuan yang dibawa oleh kaum Wahabi. Wahabi sendiri adalah nama seorang ulama yang mencetuskan gerakan pembaharuan keagamaan Islam yang terkenal dengan doktrin kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Gerakan ini muncul sebagai respon terhadap kondisi kejumudan yang dialami oleh masyarakat Islam di hampir penjuru dunia. Kemandekan atau kejumudan ini terjadi di semua lapangan kehidupan. Baik itu kehidupan politik, sosial, keagamaan dan seterusnya. Dalam kehidupan politik misalnya, hampir semua negara yang berpenduduk mayoritas muslim pada abad 18 dan 19 masehi masih berada dalam kekuasaan imperialisme barat. Kondisi ini tentu saja merembet pada kondisi ekonomi, sosial, budaya negara-negara muslim tersebut yang tidak dapat berkembang dengan baik. Nah semua keterpurukan ini, bermuara pada pemahaman dan cara pandang umat Islam saat itu yang jumud. Jumud (stagnan) dalam artian menganggap bahwa pintu ijtihad itu sudah tertutup dan mapan dan anti perubahan. Atas realitas seperti inilah yang mendorong dan mengilhami tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afgani, Muhammad Abduh, Rasyid Rida, dan Muhammad Bin Abdul Wahhab untuk bangkit dari keterpurukan dengan mengubah cara pandang dan pemahaman keagamaan dunia Islam yang jumud menuju pemahaman yang dinamis dan tercerahkan sekaligus menyeru untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan ibadah yang (*bid'ah*) yaitu ibadah yang tidak ada perintah dari Allah dan contoh dari rasulNya, meninggalkan syirik, tkhayyul, khurafat, dan taklid buta.

Pada perkembangan selanjutnya, paham ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia Islam, termasuk ke Indonesia. Paham ini sendiri dibawa oleh para pedagang muslim asal Indonesia yang kembali dari Arab saudi yang selanjutnya menyebar ke seluruh nusantara. Kemudian paham ini menjadi bola salju yang semakin lama semakin besar gaungnya. Pada akhirnya mengilhami tokoh-tokoh nasional Indonesia untuk mendirikan organisasi sosial keagamaan yang pada awal berdirinya bertujuan untuk meluruskan pemahaman keagamaan umat Islam. Organisasi yang pertama kali berdiri adalah Serikat Dagang Islam (SDI) , Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan organisasi-organisasi Islam yang lainnya.

Hasilnya adalah kebangkitan umat Islam di hampir seluruh dunia Islam, termasuk di Nusantara (Indonesia). kemerdekaan Indonesia sendiri tidak terlepas dari peran dan sumbangsih pemikiran dari para tokoh pergerakan kebangsaan Indonesia yang dimotori oleh para pembaharu seperti HOS Cokroaminoto, Agus Salim, Ahmad Dahlan, Ahmad Hassan, Ahmad Surkati. Mereka-mereka inilah tokoh nasional yang mendukung pentingnya kemerdekaan bagi rakyat Indonesia.

Muhammadiyah dari Tajdid Fikih ke Tajdidi Sosial

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa Muhammadiyah, sebagai organisasi sosial keagamaan Islam, pada awal berdirinya bertujuan menyeru umat untuk kembali kepada pemahaman dan pengamalan Islam yang murni (ortodox) yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah dengan cara meninggalkan semua perbuatan yang berbau syirik, bid'ah, khurafat, dan takhayul. Namun pada perkembangan selanjutnya Muhammadiyah tumbuh menjadi organisasi masa Islam yang berorientasi pada tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan pembangunan sumber daya manusia lewat pendidikan, pendirian rumah sakit, pelayanan hukum, dan rumah yatim piatu.

Dengan tanpa meninggalkan gerakan tajdid fikih, Muhammadiyah sekarang tampil paling depan dalam memelopori perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memegang teguh etika, moral, nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai keindonesiaan yang moderat.

Sukses Muhammadiyah dengan pendidikannya, tidak lepas dari *platform* keormasannya yang berani tampil moderat, lembut, persuasif, elegant, dan sejuk. Sehingga tidak aneh kalau hal ini dapat mengundang respect dan simpati warga masyarakat untuk ikut bergabung memajukan syarikat ini. Sukses pendidikan ini terbukti dengan munculnya para tokoh Muhammadiyah yang muncul sebagai tokoh nasional. Sebut saja Ahmad Dahlan, KH Mas Mansur, Prof. Hamka, M.Amin Rais, Ahmad Syafi Maarif, Dien Syamsuddin, dan tokoh-tokoh nasional lainnya yang pemikiran-pemikirannya ikut mendorong tetap tegaknya negara Kesatuan Indonesia.

Orientasi tajdid lainnya yang tak kalah pentingnya adalah ikut mendorong tumbuhnya iklim demokratisasi, pemberdayaan masyarakat lewat *interpreneurship*, *pressure group* bagi kebijakan pemerintah yang menyimpang, benteng moral masyarakat, dan pengembangan generasi muda yang terdidik. Tentang demokratisasi, keberadaan Muhammadiyah sebagai ormas yang memiliki anggota yang cukup banyak dan merata di semua daerah di nusantara, merupakan corong yang efektif dalam menyuarakan pentingnya demokrasi bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan banyaknya majalah dan terbitan yang bersal dari kampus-kampus milik muhammadiyah secara langsung atau pun tidak ikut mendorong iklim demokrasi di Indonesia. Belum lagi lembaga-lembaga amal dan lembaga swadaya masyarakat yang menyebar di daera-daerah adalah potensi yang besar dalam mendorong tegaknya pilar demokrasi.

Pemikiran para tolok LSM Muhammadiyah dan Lembaga wirausahanya yang dikomandani oleh M. Dawam Raharjo, telah lama berkecimpung dalam kegiatan amal usaha lewat pendirian Baitul Mal wa Tamwil di daerah-daerah. Peran Muhammadiyah sebagai oposisi pemerintah dan benteng moral masyarakat juga menjadi bagian tak terpisahkan dari tajdid sosialnya. Kritik-kritik dan amar makruf nahyi munkar sering kali terdengar mendukung dari ormas ini ketika ketidakadilan mendera masyarakat kita. Pendirian Majelis Ulama Indonesia (MUI) oleh Prof HAMKA tahun 1975 adalah bukti keseriusan tokoh MUhammadiyah ini untuk senantiasa membawa, mengawal masyarakat untuk tetap berada dalam koridor akidah yang lurus. Lihat saja bagaimana fatwa MUI tentang haramnya mengucapkan selamat natal. Fatwa ini masih

berlaku sampai sekarang. Tokoh yang mundur dari kepengurusan MUI gara-gara tidak mau mencabut fatwa ini, tiada lain adalah Prof. Hamka.

Munculnya JIMM (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah), merupakan suatu pembenaran akan suksesnya Muhammadiyah dalam pengembangan sumber daya manusia, khususnya generasi muda. ide-ide segar sering muncul menghiasi surat kabar dari generasi penerus Muhammadiyah ini. terlepas dari tudingan bahwa pemikiran JIMM ini, kental dengan aroma sekuler dan heurmeunetik, tapi bahwa mereka adalah generasi yang potensial dan asset berharga untuk Muhammadiyah dan bangsa ke depan, adalah sesuatu hal yang tak terbantahkan.

Itulah gambaran kecil tentang telah terjadinya perubahan orientasi tajdid Muhammadiyah dari tajdid fikih ke tajdid sosial. Tentu saja perubahan orientasi ini tidak terjadi secara ekstrim, artinya Muhammadiyah sekarang, tidk lagi mengerjakan kefikihan. Akan tetapi yang terjadi sekarang adalah mainstream gerakannya lebih tertuju pada pemberdayaan masyarakat lewat pengembangan sumber daya manusia yang tangguh. Wallahu 'alam.

PAK RIDWAN, JUJURLAH !

Dengan berat hati dan dengan sagudang maaf, saya terpaksa harus sampaikan bahwa apa yang ditulis Pak Ridwan di harian ini, banyak di antaranya yang dikutip secara langsung tanpa menyebut sumbernya. Ada pun buku yang dikutip adalah buku “Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer” karya Jujun S. suriasumantri.

kutipan langsung yang dituangkan dalam tulisan pak Ridwan dapat dibaca mulai alinea ke-5 kolom 3 yang dalam buku jujun S. Suriasumantri terdapat pada halaman 278 mulai alinea ke-1. Sungguh ini suatu bentuk inkonsistensi dari pak Ridwan sendiri. Pada alinea ke-3 Pak Ridwan menulis seperti ini “... Kebudayaan nyontek hasil pemikiran orang lain dan pembajak hasil karya orang lain, penyematan gelar keserjanaan palsu yang sekarang ini merajalela dalam bidang pendidikan tidaklah bersifat mendidik dan harus segera dihilangkan”. Demikian Pak Ridwan menulis. Namun dalam kenyatannya, Pak Ridwan sendiri melakukan apa yang Pak ridwan larang.

Padahal kalau saja Pak Ridwan mau jujur (tanpa bermaksud menggurui) , tidaklah akan mengurangi bobot tulisan Pak Ridwan jika dalam tulisan itu, bapak tuliskan kutipan peran meningkatkan kegiatan keilmuan menurut jujun, kemudian bapak komentari, analisis dan berikan pula kritik bapak untuk pak Jujun. Manis bukan ?

Padahal saya sungguh sangat tertarik untuk membaca artikel yang ditulis oleh bapak Iwan ridwan tentang “membangun idealisme keilmuan” yang dimuat Fajar Bante tertanggal 22 Januari 2007 itu. Selain koreksi yang terhadap kaidah penulisan karya tulis di atas, saya juga hendak menyampaikan kritik mengenai substansi dari tulisan tersebut.

Saat saya membuka lembaran halaman yang berisi opini di harian ini, saya sangat tertarik untuk membacanya, karena tema atau topik yang diketengahkan dalam opini kali ini sangat berkaitan dengan area kefilosofan, lebih khusus lagi filsafat ilmu , salah satu kajian yang sangat menarik sekaligus kajian wajib bagi para akademisi dan dosen seperti saya. Namun alangkah kecewanya, ketika saya selesai membaca tulisan pak ridwan tersebut, sungguh topik yang diketengahkan sama sekali tidak relevan dengan substansi tulisan itu sendiri. Sebab jika yang dimaksudkan Pak Ridwan adalah membangun yang berarti usaha-usaha pendirian paradigma keilmuan yang berarti mengawali konsep dan paradigma keilmuan, sungguh sangat basi dan ketinggalan jaman. Mengapa demikian karena apa yang disampaikan pak Ridwan dengan tulisannya itu telah banyak disampaikan dan telah lama disampaikan oleh para ilmuwan sejak lama. sehingga jika Pak Ridwan mencoba mengkaji idealisme keilmuan seperti yang bapak tulis, maka tema yang bapak tulis bukanlah “membangun”, tapi “membangun kembali”. Kecuali jika yang bapak maksudkan adalah membangun, maka bapak harus mengemukakan hal-hal baru dan orsinil saja.

Membangun idealisme keilmuan yang saya pahami adalah menelorkan atau melahirkan ide-ide atau gagasan yang orsinil (*genuin*) tentang pemikiran-pemikiran yang ideal untuk

memajukan pengetahuan dan keilmuan dan menempatkan keduanya sebagai nilai kebudayaan dan asas moral kehidupan kebangsaan suatu bangsa.

gagasan-gagasan untuk membangun kembali strategi memajukan keilmuan dalam konteks membangun kembali kebudayaan nasional, dapat diawali dengan mengubah strategi pembangunan nasional kita yang materialisme-sekularisme menjadi spiritualisme – transenden. Ini sangat fundamental sekali bagi kemajuan kehidupan dan persemaian keilmuan yang sehat dan maju. Lihat Jepang, salah satu kunci majunya Jepang adalah asas spiritualisme yang mereka pegang. Doktrin Ketuhanan mereka mengajarkan bahwa bekerja adalah ibadah. bekerja dengan malas-malasan adalah dosa. Kondisi ini membawa pengaruh positif pada pencapaian prestasi dalam semua lapangan kehidupan termasuk di dalamnya adalah kemajuan dalam dunia ilmu dan kerja.

Gagasan lainnya adalah dengan melakukan definisi ulang tentang hakikat ilmu itu sendiri. Sementara ini ilmu didefinisikan dengan proses berfikir untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. (Jujun S. Sumantri, 1996:274). Kemudian, masih menurut Jujun, ilmu pada akhirnya bermuara pada pencarian kebenaran. Redefinisi terhadap definisi hakikat ilmu yang disampaikan Jujun, tentu masih sangat terbuka untuk dikritisi dan dikembangkan dengan cara melakukan studi perbandingan dengan khazanah keilmuan yang digagas oleh ilmuwan muslim misalnya. Ini hanya sebagai usulan awal dan niat baik supaya terjadi perkembangan keilmuan yang dinamis.

Kemudian, penggunaan kata-kata “kebudayaan nyontek, alinea ke-3 baris ke-10 yang Pak Ridwan tulis, tidak lah tepat dari sisi struktur kalimat. Mestinya adalah “budaya menyontek ...”. Karena kata “nyontek” adalah sikap dan perilaku dan itu adalah satu budaya atau kebiasaan. sedangkan kebudayaan adalah hasil atau resultante yang di dalamnya banyak terdapat sikap dan perilaku (budaya). Kata “pembajak” juga tidaklah tepat. karena “pembajak” bukanlah sifat tapi perilaku. Karena dalam kalimat selanjutnya Pak Ridwan menulis “ ...tidaklah bersifat mendidik”. Jadi Pembajak tidak tepat jika disebut “bersifat”.

Kemudian, pada alinea yang sama Pak Ridwan menulis “ ...etika dalam kegiatan keilmuan merupakan kaidah imperatif ...”. Kata “imperatif” yang saya pahami adalah larangan. sedangkan etika bukanlah semata-mata larangan, namun juga perintah. Oleh karena itu, perlu diluruskan apa yang dimaksud dengan imperatif yang Pak Ridwan maksudkan.

Inilah barangkali sebagian kritik yang dapat disampaikan. Semoga kita semua terbuka dan jujur dalam menulis sebuah karya ilmiah lebih-lebih lagi jujur dalam semua lapangan kehidupan. Bukankah jujur adalah bagian dari moral ? Dan moral adalah asas ilmu seperti yang Pak Ridwa tulis. Semoga kita semua menjadi manusia jujur. jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, dan tentu saja jujur pada Tuhan. Semoga

FORMALISASI SYARIAT ISLAM ; SEBUAH KENISCAYAAN (Tanggapan Atas Tulisan Masykur)

Mukaddimah

Membaca tulisan saudara Masykur dengan tema "Syariat Islam Bagi Orang Banten" (Banten Raya Post, 23/1/2007) yang intinya menolak formalisasi Syariat Islam, sehingga perda-perda Syariat yang sekarang marak diberlakukan di beberapa daerah di Indonesia itu tidak perlu dan berlebihan. Apa yang ditulis oleh Saudara Masykur memunculkan beberapa tanya dan asumsi di hati saya. Pertanyaan yang muncul di antaranya: Kenapa orang Islam seperti saudara Masykur tidak mendukung pemberlakuan perda syariat dan penerapan Syariat Islam di Indonesia? Bukankah orang Islam itu berkewajiban melaksanakan Syariat Islam secara menyeluruh (*kaffah*) sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW dan para shahabat-shahabatnya dulu? Apakah keengganan orang Islam untuk menerapkan Syariat Islam itu merupakan suatu keyakinan yang sudah final ataukah hanya sebagai suatu strategi saja? Adapun asumsi yang sempat muncul di antaranya: Banyak orang Islam yang kurang memahami syariat Islam, khususnya tujuan-tujuan Syariat Islam (*maqasid al-syariat*). Sehingga indahnya Syariat Islam yang akan membawa keselamatan hidup dunia dan akhirat, tidak menjadi cita-cita setiap muslim. Dan masih banyak lagi segudang tanya dan asumsi yang tersimpan di benak saya.

Syariat Islam adalah jalan, sumber mata air kehidupan yang Allah turunkan melalui nabiNya yang mengandung segenap aturan-aturan suci untuk keselamatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Allah SWT dalam beberapa ayat secara eksplisit memerintahkan orang Islam untuk mengikuti jalan (syariat) ini (QS Yusuf ayat 108). Untuk itu, tak ada alasan bagi orang Islam siapa pun di mana pun untuk tidak mendukung pemberlakuan aturan-aturan yang bertujuan menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Argumentasi apa pun yang bertujuan melakukan penolakan terhadap Syariat Islam, pasti akan rontok, karena alasan yang mendasari penolakan itu, berasal argumentasi akal dan napsu, bukan didaari oleh argumentasi wahyu yang pasti kebenarannya.

Syariat Islam dalam Konteks Banten

Penolakan secara halus terhadap penerapan Syariat Islam tampak jelas dari ungkapan Gubernur Banten Rt Atut Chosiyah dengan mengatakan "Syariat Islam ada dalam hati" (Banten raya Post, 18/1/2007). Pernyataan diplomatis ini dengan mudah dapat dipahami bahwa Syariat Islam adalah urusan masing-masing pribadi muslim dan tidak usah ditransformasikan menjadi undang-undang atau perda. Padahal, Bu Atut punya kewajiban moral untuk melakukan legalitas Syariat Islam sebagai konsekwensi logis dari ikrar syahadatain beliau. Bukankah dalam setiap sholatnya beliau selalu mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusanNya. yang berarti bahwa tiada hukum selain hukum Allah, dan Muhammad adalah tauladan yang ideal bagi peri kehidupan manusia. Mestinya Bu Atut mengatakan bahwa Syariat itu ada di dalam hati, di rumah setiap muslim, di kantor-kantor pemerintah, di gedung para legislator, di dalam sistem perundang-undangan nasional, dan di setiap sudut belahan bumi ini.

Kemudian alternatif yang diberikan saudara Masykur dengan melakukan pembagian tugas ulam-umara yang menempatkan ulama sebagai penegak amar makmur dan nahyi munkar dan umara berkewajiban mendengarkan kritik ulama, adalah gagasan basi alias lagu lama yang *out of date*. Peran ini sangat tidak efektif bagi terselenggaranya tatanan masyarakat Islam yang religius. Peran ulama yang bertugas hanya sebagai tukang kritik adalah sebagai suatu bentuk

peminggiran ulama sebagai pewaris para nabi. Bagaimana mungkin kritik itu dapat efektif kalau keberadaan ulama tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Penciptaan masyarakat religius seperti apa yang hendak dibangun dengan menempatkan ulama di luar sistem seperti itu.

Dalam sistem pemerintahan Islam, Syariat Islam adalah dasar penyelenggaraan suatu pemerintahan negara. Salah satu butir penting yang direkomendasikan dalam sistem pemerintahan Islam adalah pemimpin pemerintahan suatu negara haruslah seseorang yang paham dan menguasai syariat (Hukum Islam). Kemudian, Ulama ditempatkan sebagai hakim (*qadhi*) dan hakim agung atau mahkamah agung (*qadhi al-qudhat*). Dengan demikian, ulama berada dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Ini lah sistem yang akan membawa kepada penciptaan masyarakat yang beriman dan bertakwa.

Oleh sebab itu, jika menginginkan suatu masyarakat yang beriman dan bertakwa sesuai visi provinsi Banten, maka langkah yang harus diambil adalah melakukan formalisasi Syariat Islam dalam bentuk pemberlakuan perda-perda syariat itu. Jadi sangat logis jika muncul desakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banten kepada legislatif untuk menerapkan Syariat Islam dengan mengeluarkan perda-perda syariat sebanyak mungkin.

Ambivalensi Sikap Kita

Sesungguhnya tidak aneh membaca sikap banyak orang Islam di negeri menyangkut relasi Islam dan Negara. Sementara ini *mainstream* pemikirannya terbelah menjadi dua arus besar. Arus pertama adalah kelompok umat Islam yang berpendapat bahwa Islam tidak menyuruh umatnya untuk mendirikan negara Islam sekaligus tidak ada kewajiban untuk mentransformasikan Syariat Islam menjadi sistem perundang-undangan suatu negara. Kelompok ini menamakan diri kelompok Islam substantif yang merasa cukup melaksanakan Islam lewat prinsip-prinsipnya saja, seperti prinsip keadilan, persamaan, kebenaran, kejujuran dan prinsip-prinsip universal lainnya. Untuk konteks Indonesia, kelompok ini diwakili oleh Gusdur, Amin Rais, dan Azyumardi azra dan sebagainya. Sedangkan arus kedua adalah kelompok umat Islam yang memandang Islam sebagai agama yang menyuruh umatnya untuk mendirikan negara (khilafah) sekaligus mewajibkan umatnya untuk melakukan formalisasi syariat menjadi sistem yang tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Karena menurut kelompok ini, tidak mungkin syariat Islam tegak tanpa diwadahi oleh negara. Untuk konteks Indonesia, Kelompok ini, diwakili oleh mantan-mantan aktifis Masyumi yang dipresentasikan oleh tokoh-tokoh yang duduk di partai politik seperti PPP, PBB, PKS, dan beberapa partai Islam lainnya.

Nah, sikap yang ditunjukkan oleh beberapa tokoh dan pejabat negara kita tampak ambivalen. Di satu sisi, mereka sangat mendambakan terciptanya masyarakat yang agamis, namun tidak mau disebut sebagai negara agama. Apa yang disampaikan gubernur Atut di atas, kurang lebih seperti itu; sangat ambivalen. Padahal alangkah baiknya jika secara tegas mengatakan bahwa Banten siap dengan Syariat Islam. Atau Banten menolak Syariat Islam, supaya jelas mau dibawa kemana Banten ini ke depan dalam konteks pemberlakuan Syariat Islam.

Sikap yang selama ini muncul di tengah-tengah masyarakat Indonesia menyangkut Syariat Islam tidak lepas dari peran dakwah Islam yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. di samping itu, gencarnya arus deras sekularisasi yang melanda seluruh dimensi kehidupan masyarakat kita saat ini turut menambah suburnya sikap hidup yang sekularistik.

Semoga tulisan ini menyadarkan kita semua akan indahnya Syariat Islam yang akan membawa kita pada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Semoga.

KRISIS NUKLIR IRAN DAN POLITIK LUAR NEGERI PEMERINTAH RI

Dukungan pemerintah Republik Indonesia atas dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB no 1474 terhadap pengembangan nuklir Iran, patut mendapat perhatian serius seluruh elemen bangsa. Kenapa ? Karena dukungan ini jelas suatu bentuk pengkhianatan terhadap solidaritas anatar sesama negara Islam sekaligus sebagai suatu bentuk ketidakberdayaan pemerintah RI terhadap hegemoni Amerika dan sekutu-sekutunya.

Semua orang di kolong langit ini mafhum bahwa resolusi untuk Iran itu hanya akal-akalan Amerika untuk membungkam Iran agar tidak mengembangkan teknologi nuklirnya. Adapun alasan dijatuhkannya resolusi itu sendiri sangatlah dangkal dan mengada-ngada. Meskipun pemerintah Iran beberapa kali menjelaskan bahwa pengembangan nuklir negaranya ditujukan untuk tujuan-tujuan damai dan bukan ditujukan untuk pengembangan persenjataan dan pertahanan, namun tetap saja Amerika bersikukuh bahwa pengembangan nuklir Iran harus dihentikan. Jadi, apa pun alasannya Iran harus patuh dengan keinginan Amerika.

Oleh karena itu, kebijakan politik luar negeri Pemerintahan SBY yang mendukung resolusi DK PBB adalah suatu bentuk kemunduran diplomasi. Bagaimana tidak, Pemerintah RI tentu sangat faham bahwa watak Amerika yang ingin menjadi penguasa dunia dan setiap negara harus tunduk di bawah tekanannya. Nah kalau alasan Pemerintah RI yang mendukung resolusi DK PBB itu didasarkan pada suatu pemikiran bahwa pengembangan nuklir suatu negara diperkenankan hanya untuk tujuan damai dan jika ditujukan untuk tujuan-tujuan pertahanan dan persenjataan, maka harus ditentang dan dihentikan adalah suatu diplomasi yang lemah, karena tidak didasarkan argumentasi yang kuat.

Dalam konteks pengembangan nuklir Iran, Pemerintah RI berpendapat bahwa pengembangan nuklir Iran itu ditujukan untuk persenjataan dan pertahanan. Oleh karena itu, Pemerintahan RI menolak rencana Taheran itu sekaligus mendukung resolusi DK PBB. Padahal, Apa pun alasannya, Amerika tetap akan menjatuhkan sanksi terhadap Iran meskipun dengan tujuan damai.

Jika demikian, tentu ada sesuatu dibalik dukungan Pemerintah RI itu. Mustahil Pemerintahan SBY tidak mengetahui politik luar negeri Amerika yang ambisius itu. Sehingga muncul beberapa spekulasi yang di antaranya adalah Amerika menawarkan bebrapa bantuan materil kepada pemerintah RI jika pemerintahan kita mendukung resolusi terhadap Iran,. Katakanlah sebagai imbalan atau balas budi atas dukungan itu. Atau bisa saja pemerintahan kita ditekan sedemikian rupa oleh Pemerintah Amerika agar mendukung resolusi itu. Yang pasti pemerintah kita telah mengorbankan solidaritas dengan dukungan terhadap resolusi itu.

Sebagai negara berdaulat, Iran tentu saja berhak mengembangkan teknologi nuklir tanpa ada tekanan dari negara mana pun termasuk Amerika. Intervensi asing terhadap kebijakan suatu negara jelas suatu bentuk penjajahan dan pemaksaan kehendak. Di jaman sekarang ini, bentuk pemaksaan ini jangan pernah terjadi. Karena jika hal ini terjadi, akan merusak tatanan dunia global.

Sikap negara Barat sendiri tampak ambivalen terhadap pengembangan nuklir Iran ini. Lihat saja bagaimana Israel, Korea Utara, India, dan Pakistan yang secara nyata mengembangkan senjata nuklir untuk persenjataan perangnya. Negara-negara ini dengan bebas memproduksi senjata-senjata pemusnah massal ini. Amerika dan sekutu-sekutunya diam seribu basa dan seolah tidak mengetahuinya. dari sini muncul beberapa spekulasi mengapa Amerika mengijinkan beberapa negara untuk mengembangkan teknologi nuklirnya dan pada kesempatan lain, Amerika melarang dan menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara tertentu yang sama-sama mengembangkan nuklir. Kenapa demikian ? Jawabannya tentu sangat

ideologis. Negara Barat tidak mau melihat ada negara Islam yang menguasai teknologi nuklir. Karena ini akan mengancam eksistensi dan sistem pertahanan mereka. Untuk itu, sekali lagi sebagai warga negara saya sangat kecewa atas ketidak berdayaan pemerintahan kita yang begitu manut dan leمبرk dengan tekanan negara kuat seperti Amerika. Dengan demikian segera pemerintah RI mencabut dukungan resolusi DK PBB itu demi menjaga solidaritas negara Islam. Wallahu 'Alam.

